Peta Mutu Pendidikan

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)

(Berdasarkan Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan)

Diterbitkan oleh
Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi LPMP Sumatera Selatan Tahun 2018

Pengarah : Dr. H. Yaswardi, M.Si.

Penanggungjawab : MA. Fainaludin, S.Ag., M.M.

Penyusun :
1. Sugianto, S.Pd., M.M.
2. Lidya Santika, S.Si., M.Pd.
3. Sangadah, M.Pd
4. Emilda, S.Pd., M.Si.
5. Yulidar, SE., M.M.
6. Baba M. Khotami, S.Kom.
7. Desi Eka Ariany, S.Pd, M.Si.
8. Wiryadi, M.Si.
9. Tedi Rahman, S.T.
10. Karwan Sugiarto, S.AP., M.Si.
11. Tri Hastuti Hestianti, S.Pd.
12. Sri Kusdiningsih, S.Sos.
13. Endang Sumarti

Editor : Lidya Santika, S.Si., M.Pd.

Kontributor Data :
1. Operator Satuan Pendidikan
2. Operator Data Dinas Pendidikan

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Standar Nasional Pendidikan, dan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah. Tujuan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah oleh satuan pendidikan di Indonesia berjalan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Pemenuhan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen satuan pendidikan. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan dengan pendekatan yang melibatkan seluruh komponen satuan pendidikan (*whole school approach*) agar seluruh komponen satuan pendidikan bersama-sama memiliki budaya mutu.

Salah satu upaya untuk menindaklanjuti hal di atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah telah membuat kebijakan dengan menetapkan program penjaminan mutu satuan pendidikan dan pengembangan sekolah model penjaminan mutu pendidikan.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Selatan sebagai Unit Pelaksana Teknis Ditjen Dikdasmen telah melakukan tahapan awal siklus penjaminan mutu yaitu dengan melakukan pengumpulan data mutu satuan pendidikan. Selanjutnya data tersebut dianalisis sehingga menghasilkan peta mutu pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, LPMP Sumatera Selatan telah berhasil menyusun Peta Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD).

Semoga Peta Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Satuan Pendidikan SD yang telah disusun oleh LPMP Sumatera Selatan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu pendidikan khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Indralaya, Desember 2018
Kepala LPMP Sumatera Selatan,

Dr. H. Yaswardi, M.Si.
NIP 196312151987031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GRAFIK v

I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Tujuan 1

C. Manfaat 2

II. METODOLOGI PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS 3

A. Sasaran Pemetaan Mutu 3

B. Teknik Pengumpulan Data 3

C. Teknik Analisis Data 5

III. HASIL PEMETAAN MUTU 7

A. Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan 7

B. Status Sekolah Sasaran 7

C. Deskripsi Data Mutu Pendidikan 8

1. Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan 10

2. Pemenuhan Standar Isi 13

3. Pemenuhan Standar Proses 15

4. Pemenuhan Standar Penilaian Pendidikan 18

5. Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 22

6. Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana 36

7. Pemenuhan Standar Pengelolaan 43

8. Pemenuhan Standar Pembiayaan 49

IV. KESIMPULAN, IMPLIKASI MANAJERIAL, DAN REKOMENDASI 54

A. Kesimpulan 54

B. Implikasi Manajerial 56

C. Rekomendasi 57

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kisi-Kisi Instrumen Pemetaan Mutu Satuan Pendidikan 5
Tabel 2.2 Rentang Klasifikasi Data Pemetaan Mutu Sekolah.....6
Tabel 3.1 Jumlah Sekolah Sasaran..... 7
Tabel 3.2 Jumlah Sekolah Sasaran.....7
Tabel 3.3 Jumlah Satuan Pendidikan Berdasarkan Kategori Pemenuhan SNP. 8

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Prosedur Pengumpulan Data Peta Mutu 3
Grafik 3.1 Pemenuhan SNP Sekolah Dasar 9
Grafik 3.2 Rerata Pemenuhan SNP Setiap Kabupaten/Kota 9
Grafik 3.3 Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan 10
Grafik 3.4 Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan 10
Grafik 3.5 Pemenuhan Dimensi Sikap 11
Grafik 3.6 Pemenuhan Dimensi Pengetahuan 12
Grafik 3.7 Pemenuhan Dimensi Keterampilan 12
Grafik 3.8 Pemenuhan Standar Isi 13
Grafik 3.9 Pemenuhan Standar Isi Setiap Kabupaten/Kota 13
Grafik 3.10 Pemenuhan Dimensi Muatan Kurikulum 14
Grafik 3.11 Pemenuhan Dimensi Rancangan Mata Pelajaran dan Beban Belajar 14
Grafik 3.12 Pemenuhan Dimensi Kurikulum 15
Grafik 3.13 Pemenuhan Standar Proses 15
Grafik 3.14 Pemenuhan Standar Proses Setiap Kabupaten/Kota 16
Grafik 3.15 Pemenuhan Dimensi Perencanaan Proses Pembelajaran 16
Grafik 3.16 Pemenuhan Dimensi Pelaksanaan Pembelajaran 17
Grafik 3.17 Pemenuhan Dimensi Pengawasan Proses Pembelajaran 17
Grafik 3.18 Pemenuhan Standar Penilaian Pendidikan 18
Grafik 3.19 Pemenuhan Standar Penilaian Pendidikan Setiap Kabupaten/Kota 18
Grafik 3.20 Pemenuhan Dimensi Lingkup Penilaian Pendidikan 19
Grafik 3.21 Pemenuhan Dimensi Tujuan Penilaian Pendidikan 19
Grafik 3.22 Pemenuhan Dimensi Manfaat Penilaian Pendidikan 20
Grafik 3.23 Pemenuhan Dimensi Prinsip Penilaian Pendidikan 20
Grafik 3.24 Pemenuhan Dimensi Mekanisme Penilaian Pendidikan 21
Grafik 3.25 Pemenuhan Dimensi Prosedur Penilaian Pendidikan 21
Grafik 3.26 Pemenuhan Dimensi Instrumen Penilaian Pendidikan 22
Grafik 3.27 Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 23
Grafik 3.28 Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Setiap Kabupaten/Kota 23
Grafik 3.29 Pemenuhan Dimensi Kepala Sekolah 24
Grafik 3.30 Pemenuhan Dimensi Kepala Sekolah 24
Grafik 3.31 Pemenuhan Indikator Kualifikasi Kepala Sekolah 25
Grafik 3.32 Pemenuhan Indikator Kualifikasi Kepala Sekolah 25
Grafik 3.33 Pemenuhan Indikator Kompetensi Kepala Sekolah 26
Grafik 3.34 Pemenuhan Indikator Kompetensi Kepala Sekolah 26
Grafik 3.35 Pemenuhan Dimensi Pendidik (Guru) 27
Grafik 3.36 Pemenuhan Dimensi Pendidik (Guru) Setiap Kabupaten/Kota 27
Grafik 3.37 Pemenuhan Indikator Jumlah Guru 28

Grafik 3.38 Pemenuhan Indikator Jumlah Guru Setiap Kabupaten/Kota 28
Grafik 3.39 Pemenuhan Indikator Kualifikasi Pendidik (Guru) 29
Grafik 3.40 Pemenuhan Indikator Kualifikasi Pendidik (Guru) Setiap Kabupaten/Kota 29
Grafik 3.41 Pemenuhan Indikator Kompetensi Pendidik (Guru) 30
Grafik 3.42 Pemenuhan Indikator Kompetensi Pendidik (Guru) Setiap Kabupaten/Kota 30
Grafik 3.43 Pemenuhan Dimensi Tenaga Administrasi Sekolah 31
Grafik 3.44 Pemenuhan Dimensi Tenaga Administrasi Sekolah Setiap Kabupaten/Kota 31
Grafik 3.45 Pemenuhan Indikator Kepala Tenaga Administrasi Sekolah 32
Grafik 3.46 Pemenuhan Indikator Kepala Tenaga Administrasi Sekolah Setiap Kabupaten/Kota 32
Grafik 3.47 Pemenuhan Indikator Pelaksana Urusan Administrasi 33
Grafik 3.48 Pemenuhan Indikator Pelaksana Urusan Administrasi Setiap Kabupaten/Kota 33
Grafik 3.49 Pemenuhan Indikator Tenaga Layanan Khusus 34
Grafik 3.50 Pemenuhan Indikator Tenaga Layanan Khusus Setiap Kabupaten/Kota 34
Grafik 3.51 Pemenuhan Dimensi Tenaga Perpustakaan 35
Grafik 3.52 Pemenuhan Dimensi Tenaga Perpustakaan Setiap Kabupaten/Kota 35
Grafik 3.53 Pemenuhan Dimensi Tenaga Laboratorium 36
Grafik 3.54 Pemenuhan Dimensi Tenaga Laboratorium Setiap Kabupaten/Kota 36
Grafik 3.55 Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana 37
Grafik 3.56 Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Setiap Kabupaten/Kota 37
Grafik 3.57. Pemenuhan Dimensi Kapasitas Satuan Pendidikan 38
Grafik 3.58 Pemenuhan Dimensi Kapasitas Satuan Pendidikan Setiap Kabupaten/Kota 38
Grafik 3.59 Pemenuhan Dimensi Lahan 39
Grafik 3.60 Pemenuhan Dimensi Lahan Setiap Kabupaten/Kota 39
Grafik 3.61 Pemenuhan Dimensi Bangunan Gedung 40
Grafik 3.62 Pemenuhan Dimensi Bangunan Gedung Setiap Kabupaten/Kota 40
Grafik 3.63 Pemenuhan Dimensi Kelengkapan Sarana dan Prasarana 41
Grafik 3.64 Pemenuhan Dimensi Kelengkapan Sarana dan Prasarana Setiap Kabupaten/Kota 41
Grafik 3.65 Pemenuhan Indikator Kelengkapan Ruang Pembelajaran Umum 42
Grafik 3.66 Pemenuhan Indikator Kelengkapan Ruang Pembelajaran Umum Setiap Kabupaten/Kota 42
Grafik 3.67 Pemenuhan Indikator Kelengkapan Ruang Penunjang 43
Grafik 3.68 Pemenuhan Indikator Kelengkapan Ruang Penunjang Setiap Kabupaten/Kota 43
Grafik 3.69 Pemenuhan Standar Pengelolaan 44

Grafik 3.70 Pemenuhan Standar Pengelolaan Setiap Kabupaten/Kota 44
Grafik 3.71 Pemenuhan Dimensi Perencanaan Program 45
Grafik 3.72 Pemenuhan Dimensi Perencanaan Program Setiap Kabupaten/Kota 45
Grafik 3.73 Pemenuhan Dimensi Pelaksanaan Rencana Kerja 46
Grafik 3.74 Pemenuhan Dimensi Pelaksanaan Rencana Kerja Setiap Kabupaten/Kota 46
Grafik 3.75 Pemenuhan Dimensi Pengawasan dan Evaluasi 47
Grafik 3.76 Pemenuhan Dimensi Pengawasan dan Evaluasi Setiap Kabupaten/Kota 47
Grafik 3.77 Pemenuhan Dimensi Kepemimpinan Kepala Sekolah 48
Grafik 3.78 Pemenuhan Kepemimpinan Kepala Sekolah Setiap Kabupaten/Kota 48
Grafik 3.79 Pemenuhan Dimensi Sistem Informasi Manajemen 49
Grafik 3.80 Pemenuhan Dimensi Sistem Informasi Manajemen Setiap Kabupaten/Kota 49
Grafik 3.81 Pemenuhan Standar Pembiayaan 50
Grafik 3.82 Pemenuhan Standar Pembiayaan Setiap Kabupaten/Kota 50
Grafik 3.83 Pemenuhan Dimensi Sekolah Memberikan Layanan Subsidi Silang 51
Grafik 3.84 Pemenuhan Dimensi Sekolah Memberikan Layanan Subsidi Silang Setiap Kabupaten/Kota 51
Grafik 3.85 Pemenuhan Dimensi Beban Operasional Sekolah 52
Grafik 3.86 Pemenuhan Dimensi Beban Operasional Sekolah Setiap Kabupaten/Kota 52
Grafik 3.87 Pemenuhan Dimensi Sekolah Melakukan Pengelolaan Dana Dengan Baik 53
Grafik 3.88 Pemenuhan Dimensi Sekolah Melakukan Pengelolaan Dana Dengan Baik Setiap Kabupaten/Kota 53

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, memuat aturan tentang kewajiban setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab satuan pendidikan yang harus didukung oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing serta peran serta masyarakat.

Proses penjaminan mutu seharusnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pimpinan melainkan menjadi tanggung jawab semua orang dalam organisasi. Seharusnya semua komponen sekolah melakukan tindakan yang benar sesuai standar yang ditentukan. Pemahaman tentang pembelajaran yang baik sesuai dengan standar dan upaya pemenuhannya seharusnya dilakukan secara sadar oleh setiap pemangku kepentingan. Keberhasilan melaksanakan manajemen pada suatu proses sangat ditentukan oleh iklim organisasi, yakni komunikasi dan tim kerja yang harmonis dan kompak.

Penerapan penjaminan mutu dalam bidang pendidikan memerlukan komitmen yang tinggi dari seluruh unsur yang terlibat dalam proses pendidikan. Komitmen itu terutama dicerminkan dari kinerja yang semaksimal mungkin diarahkan untuk memberi jasa pendidikan kepada konsumen, terutama peserta didik, sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam upaya memastikan sejauhmana pemenuhan SNP diimplementasikan di semua satuan pendidikan, maka pada tahun anggaran 2018 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui LPMP Sumatera Selatan telah melakukan kegiatan pengumpulan data mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan pendekatan Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Dari hasil analisis terhadap data mutu tersebut, akhirnya dapat disusun dan diterbitkan Buku Peta Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD).

B. Tujuan

Tujuan penyusunan peta mutu pendidikan secara umum untuk mendapatkan gambaran pemenuhan SNP Provinsi Sumatera Selatan satuan pendidikan sekolah dasar.

Secara khusus tujuan penyusunan peta mutu pendidikan ini adalah:

1. Untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya penyusunan Peta Mutu Pendidikan.
2. Menjelaskan strategi pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan.
3. Menguraikan keterlibatan LPMP, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi dan Satuan Pendidikan dalam pengumpulan data peta mutu pendidikan.
4. Menguraikan unsur yang terlibat dalam pemetaan mutu pendidikan dasar dan tugas masing-masing.
5. Memberikan informasi pemenuhan SNP satuan pendidikan sekolah dasar.

6. Merekomendasikan tindak lanjut yang harus dilaksanakan dalam rangka pemenuhan SNP.

C. Manfaat

Kelemahan-kelemahan dan rekomendasi dari hasil analisis data mutu pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dapat digunakan untuk langkah awal dalam membuat perencanaan peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan. Lebih rinci hasil analisis akan dapat bermanfaat dalam hal sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud melalui Direktorat Pembinaan SD, Peta Mutu Pendidikan Satuan Pendidikan SD Tahun 2018 ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber data/acuan dalam penyusunan kebijakan bagi pemenuhan SNP di seluruh satuan pendidikan SD.
2. Bagi dinas pendidikan kabupaten/kota se-Sumatera Selatan, Peta Mutu Pendidikan Satuan Pendidikan SD Tahun 2018 ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber data/acuan dalam penyusunan rencana pemenuhan SNP di semua satuan pendidikan SD di seluruh Provinsi Sumatera Selatan.
3. Bagi LPMP Sumatera Selatan, Peta Mutu Pendidikan Satuan pendidikan SD Tahun 2018 ini dapat digunakan sebagai *database* dalam sistem informasi mutu serta data pendukung lainnya sebagai bahan pengembangan program penjaminan mutu pendidikan di provinsi.
4. Bagi satuan pendidikan, Peta Mutu Pendidikan Satuan pendidikan SD Tahun 2018 ini dapat digunakan sebagai data dasar dalam penyusunan perencanaan program peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
5. Bagi perguruan tinggi, Peta Mutu Pendidikan Satuan pendidikan SD Tahun 2018 ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan/acuan pengembangan program kemitraan.

BAB II
METODOLOGI PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS

A. Sasaran Pemetaan Mutu

Sasaran pemetaan mutu pendidikan melibatkan seluruh komponen sekolah (*whole school approach*) yang terdiri atas unsur pengawas sekolah, kepala sekolah, dan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) di Provinsi Sumatera Selatan. Tahun 2018 LPMP Sumatera Selatan telah melakukan pengumpulan data mutu sekolah dasar dengan jumlah sasaran 4.633 sekolah.

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan rapor mutu sekolah sebagai berikut:

a. Menyiapkan instrumen pengumpulan data mutu satuan pendidikan beserta aplikasinya.
b. Menyelenggarakan bimbingan teknis pengawas sebagai pengawas pendamping.
c. Melaksanakan sosialisasi pengumpulan data mutu satuan pendidikan.
d. Melakukan pengumpulan data mutu satuan pendidikan.
e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan data mutu satuan pendidikan.
f. Melakukan verifikasi dan validasi data oleh pengawas pendamping.
g. Melakukan perbaikan data oleh satuan pendidikan
h. Melakukan verifikasi dan validasi data oleh pengelola data LPMP Sumatera Selatan.

Secara grafis, prosedur pengumpulan data mutu satuan pendidikan sebagai dasar pembuatan peta mutu pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ini dapat dilihat pada gambar berikut:

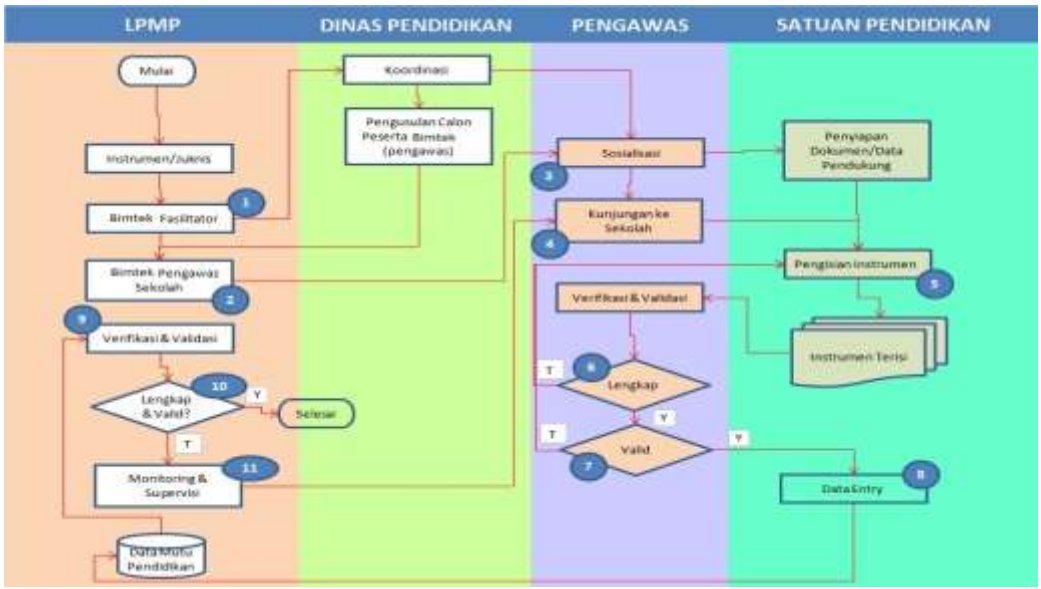

Grafik 2.1 Prosedur Pengumpulan Data Peta Mutu

Jika dibagi kedalam tiga tahap, prosedur pengumpulan data mutu pendidikan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Persiapan:
   1) Menyusun rencana pelaksanaan pengisian instrumen
   2) Penetapan waktu, jadwal dan tempat
   3) Responden
   4) Penyiapan dokumen dan materi pendukung (panduan, aplikasi dan lainnya)
   5) Penggandaan instrumen (bila diperlukan)
b. Pelaksanaan:
   1) Pembagian dan penjelasan instrumen kepada responden
   2) Bimbingan teknis pengisian instrumen oleh pengawas sekolah
   3) Pengisian instrumen oleh responden (dalam hal ini diisi oleh TPMPS).
c. Paska pengisian instrumen:
   1) Pemeriksaan kelengkapan instrumen oleh TPMPS
   2) Penyerahan dokumen terisi lengkap ke pengawas
   3) Verifikasi dan validasi oleh pengawas.

Verifikasi dan validasi data oleh pengawas ini diperlukan untuk menjamin agar data yang diberikan/diisi oleh setiap sekolah, benar-benar menggambarkan kondisi sekolah yang sebenarnya. Adapun mekanisme verifikasi dan validasi oleh pengawas sekolah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengawas meneliti setiap instrumen satu persatu.
b. Pengawas memberi tanda pada instrumen yang tidak lengkap dan validitas datanya diragukan.
c. Pengawas memberi catatan di atas semua instrumen yang belum lengkap atau validitas datanya diragukan.
d. Instrumen yang belum lengkap dan validitas datanya diragukan yang telah diberi catatan dikembalikan kesekolah untuk dilengkapi atau diperbaiki.
e. Pengawas melakukan pengecekan kembali hasil pengisian oleh personel sekolah.
f. Pengawas mengisi kuesioner pengawas sekolah sesuai dengan kondisi sebenarnya di sekolah sebagai materi pengecekan isian sekolah.

2. Alat Pengumpul Data

Alat untuk mengumpulkan data mutu pendidikan ini menggunakan teknik skala Likert yang berbentuk kuisioner. Kuisioner yang digunakan terdiri dari 8 (delapan) macam yaitu:

a. Kuisioner Standar Kompetensi Lulusan
b. Kuisioner Standar Isi
c. Kuisioner Standar Proses
d. Kuisioner Standar Penilaian
e. Kuisioner Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
f. Kuisioner Standar Pengelolaan
g. Kuisioner Standar Sarana dan Prasarana
h. Kuisioner Standar Pembiayaan

Adapun kisi-kisi untuk masing-masing kuisioner tersebut dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Kisi-Kisi Instrumen Pemetaan Mutu Satuan Pendidikan

STANDAR		DIMENSI	
1.	Standar Kompetensi Lulusan	1.1	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap
		1.2	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan
		1.3	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan
2.	Standar Isi	2.1	Muatan Kurikulum
		2.2	Rancangan mata pelajaran dan beban belajar
		2.3	Kurikulum
3.	Standar Proses	3.1	Perencanaan Pembelajaran
		3.2	Pelaksanaan Pembelajaran dan Pelaksaaan Penilaian
		3.3	Pengawasan Proses Pembelajaran
4.	Standar Penilaian	4.1	Lingkup penilaian pendidikan
		4.2	Tujuan penilaian pendidikan
		4.3	Manfaat penilaian pendidikan
		4.4	Prinsip penilaian pendidikan
		4.5	Mekanisme penilaian pendidikan
		4.6	Prosedur penilaian pendidikan
		4.7	Instrumen penilaian pendidikan
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.1	Kepala Sekolah
		5.2	Pendidik (Guru)
		5.3	Tenaga Administrasi Sekolah
		5.4	Tenaga Perpustakaan
		5.5	Tenaga Laboratorium
6.	Standar Sarana dan Prasarana	6.1	Kapasitas Satuan pendidikan
		6.2	Lahan
		6.3	Bangunan gedung
		6.4	Kelengkapan sarana dan prasarana
7.	Standar Pengelolaan	7.1	Perencanaan Program
		7.2	Pelaksanaan Rencana Kerja
		7.3	Pengawasan dan Evaluasi
		7.4	Kepemimpinan Sekolah
		7.5	Sistem Informasi Manajemen
8.	Standar Pembiayaan	8.1	Sekolah memberikan layanan subsidi silang
		8.2	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan
		8.3	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik

C. Teknik Analisis Data

Data yang didapat dari hasil pemetaan mutu satuan pendidikan berupa data kuantitatif pada file excel untuk selanjutnya dianalisis menggunakan analisis

deskriptif kuantitatif dengan melakukan pembobotan dan persentase terhadap indikator yang ditanyakan.

Hasil isian kuesioner responden dikonversi ke dalam aplikasi excel dengan menggunakan sistem pembobotan *preference* dengan mempertimbangkan keterlibatan dan peran masing-masing dimensi, dan indikator. Selanjutnya data konversi tersebut dikompilasi, direduksi dengan menggunakan fungsi rata-rata dan dilakukan analisis deskriptif. Data hasil pemetaan tersebut diklasifikasi berdasarkan skala berikut ini:

Tabel 2.2 Rentang Klasifikasi Data Pemetaan Mutu Sekolah

Rentang Nilai		Kategori	
Batas Bawah	Batas Atas		
0	2,04	Menuju SNP 1	I
2,05	3,7	Menuju SNP 2	II
3,71	5,06	Menuju SNP 3	III
5,07	6,66	Menuju SNP 4	IV
6,67	7	SNP	V

BAB III
HASIL PEMETAAN MUTU

A. Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan

Pemetaan mutu pendidikan Provinsi Sumatera Selatan satuan pendidikan SD ini dilaksanakan selama 5 bulan dari bulan Mei – September 2018 melalui penyebaran kuisioner dalam format digital/excel kepada seluruh sekolah sasaran di Provinsi Sumatera Selatan dengan distribusi sekolah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Sekolah Sasaran

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah	Persentase (%)
1	Musi Banyuasin	458	9.89
2	Ogan Komering Ilir	467	10.08
3	Ogan Komering Ulu	197	4.25
4	Muara Enim	374	8.07
5	Lahat	298	6.43
6	Musi Rawas	311	6.71
7	Banyuasin	496	10.71
8	OKU Timur	424	9.15
9	OKU Selatan	278	6.00
10	Ogan Ilir	259	5.59
11	Empat Lawang	184	3.97
12	P A L I	116	2.50
13	MURATARA	125	2.70
14	Palembang	363	7.84
15	Prabumulih	95	2.05
16	Lubuk Linggau	99	2.14
17	Pagaralam	89	1.92
	Jumlah	**4633**	**100**

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

B. Status Sekolah Sasaran

Sekolah sasaran yang menjadi peserta pemetaan mutu pendidikan ini terdiri atas 4283 sekolah negeri (92,45 persen) dan 350 sekolah swasta (7,55 persen). Secara rinci status sekolah ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Status Sekolah Sasaran

No	Status Sekolah	Jumlah	Persentase (%)
1.	Negeri	4283	92.45
2.	Swasta	350	7.55
	Jumlah	**4633**	**100**

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

C. Deskripsi Data Mutu Pendidikan

Deskripsi data pemetaan mutu pendidikan ini bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai peta mutu secara keseluruhan. Ada sembilan deskripsi data pemetaan mutu yang akan disajikan, yaitu: 1) data mengenai peta mutu pendidikan Provinsi Sumatera Selatan satuan pendidikan SD, 2) data mengenai Pemenuhan standar kompetensi lulusan, 3) Pemenuhan standar isi, 4) Pemenuhan standar proses, 5) Pemenuhan standar penilaian, 6) Pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, 7) Pemenuhan standar pengelolaan, 8) Pemenuhan standar sarana dan prasarana, serta 9) Pemenuhan standar pembiayaan.

Dari hasil analisis diketahui bahwa secara umum pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan untuk satuan pendidikan SD di Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai kategori IV atau Menuju SNP 4. Hal itu dapat dilihat dari jumlah satuan pendidikan yang bar,u mencapai kategori IV atau Menuju SNP 4 yakni sebanyak 4123 sekolah atau 88,99 persen, sedangkan satuan pendidikan yang telah mencapai kategori V atau telah memenuhi SNP baru sebanyak 83 sekolah atau 1,79 persen. Selebihnya ada 413 sekolah atau 8,91 persen yang masih berada dalam kategori III atau Menuju SNP 3, dan 14 sekolah atau 0,30 persen baru memenuhi kategori II atau Menuju SNP 2. Secara rinci jumlah sekolah yang telah memenuhi kategori pemenuhan SNP tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Jumlah Satuan Pendidikan Berdasarkan Kategori Pemenuhan SNP

KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
Menuju SNP 1	0	0
Menuju SNP 2	14	0.30
Menuju SNP 3	413	8.91
Menuju SNP 4	4123	88.99
SNP	83	1.79
Jumlah	**4633**	100

Jika dilihat dari pemenuhan di masing-masing standar, diketahui bahwa pemenuhan standar mutu pendidikan Provinsi Sumatera Selatan satuan pendidikan sekolah dasar, sebagian besar telah mencapai kategori Menuju SNP 4. Dari 8 standar yang dinilai, diketahui bahwa standar pembiayaan menjadi standar dengan skor pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 6,13, sedangkan standar pendidik dan tenaga kependidikan menjadi standar dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 5,02.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemenuhan standar mutu pendidikan satuan pendidikan sekolah dasar di Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai kategori **Menuju SNP 4** dengan grafik peta mutu satuan pendidikan sekolah dasar sebagai berikut:

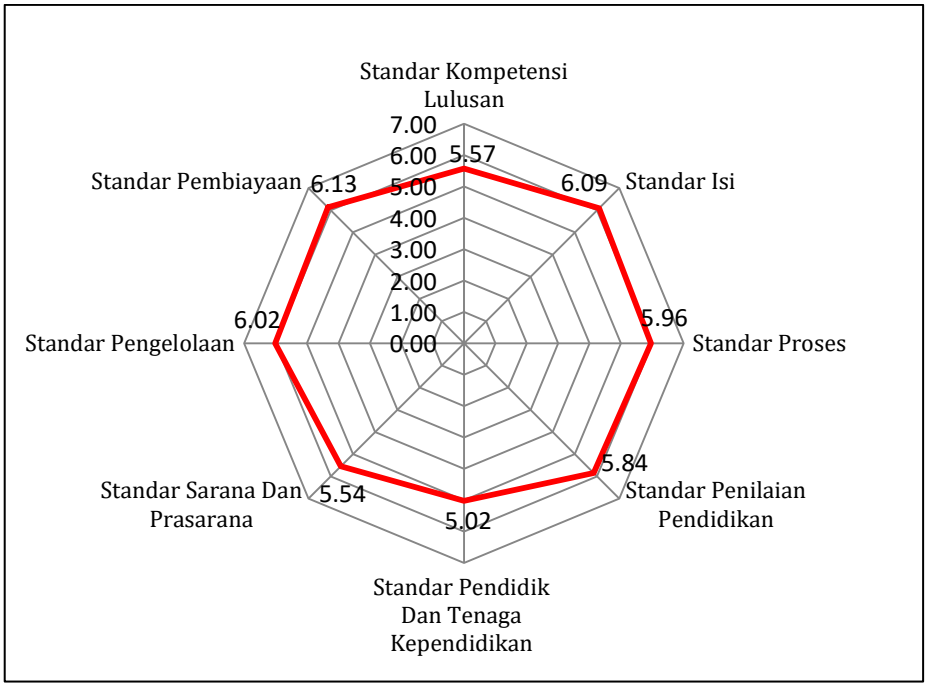

Grafik 3.1 Pemenuhan SNP Sekolah Dasar

Rerata pemenuhan SNP setiap kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat seperti pada Grafik 3.2 berikut:

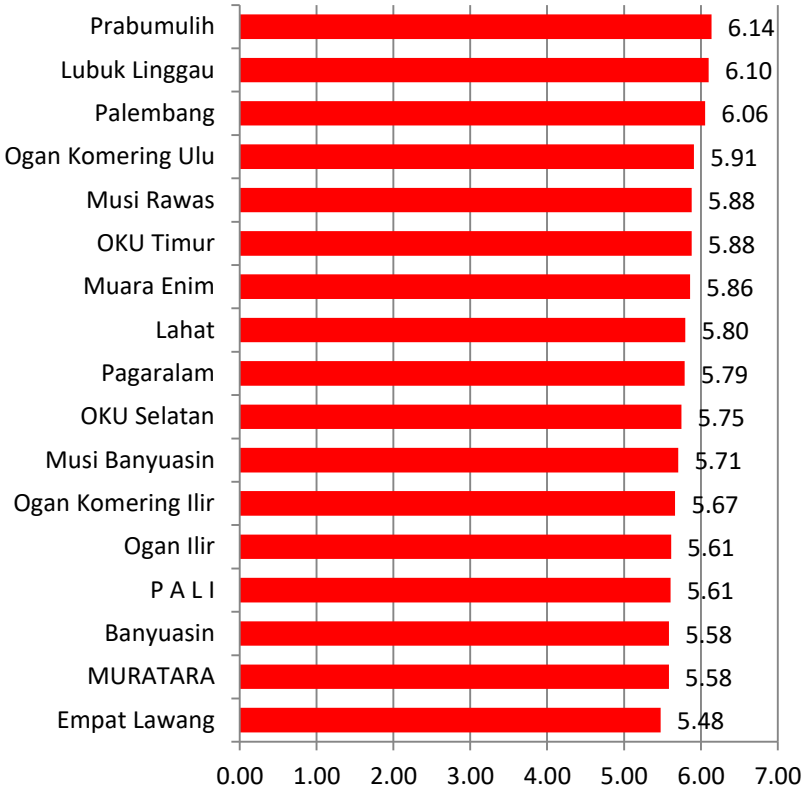

Grafik 3.2 Rerata Pemenuhan SNP Setiap Kabupaten/Kota

1. Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan

Dari hasil analisis diketahui bahwa pemenuhan standar kompetensi lulusan satuan pendidikan sekolah dasar Provinsi Sumatera Selatan, secara umum baru mencapai kategori Menuju SNP 4 dengan skor 5,57. Dari 3 dimensi yang membentuk standar kompetensi lulusan, diketahui bahwa dimensi ke-3 yakni "lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan" menjadi dimensi dengan skor pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 6,22, sedangkan dimensi ke-2 yakni dimensi "lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan" menjadi dimensi dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 4,55.

Secara grafis pemenuhan standar kompetensi lulusan pada masing-masing dimensi dapat dijelaskan sebagai berikut:

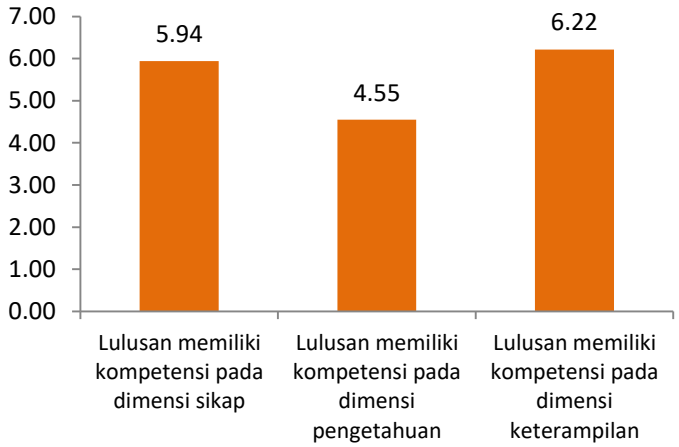

Grafik 3.3 Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan

Pemenuhan standar kompetensi lulusan berdasarkan dimensi setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada Grafik 3.4 berikut:

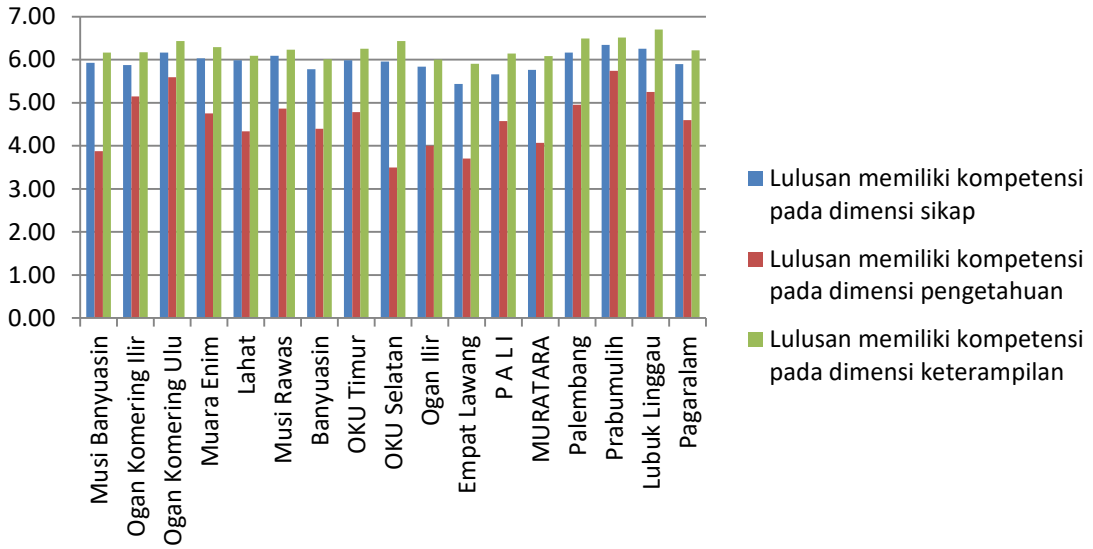

Grafik 3.4 Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan

a. Pemenuhan Dimensi Sikap

Dari 3 indikator yang membentuk dimensi ke-1 (lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap) diketahui bahwa indikator "lulusan memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 6,32, sedangkan indikator "lulusan memiliki karakter positif seperti yang diharapkan oleh nilai-nilai agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 5,69.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemenuhan dimensi ke-1 (lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap) dari standar kompetensi lulusan satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai kategori Menuju SNP 4 dengan skor rerata 5,94. Secara grafis pemenuhan dimensi sikap pada masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

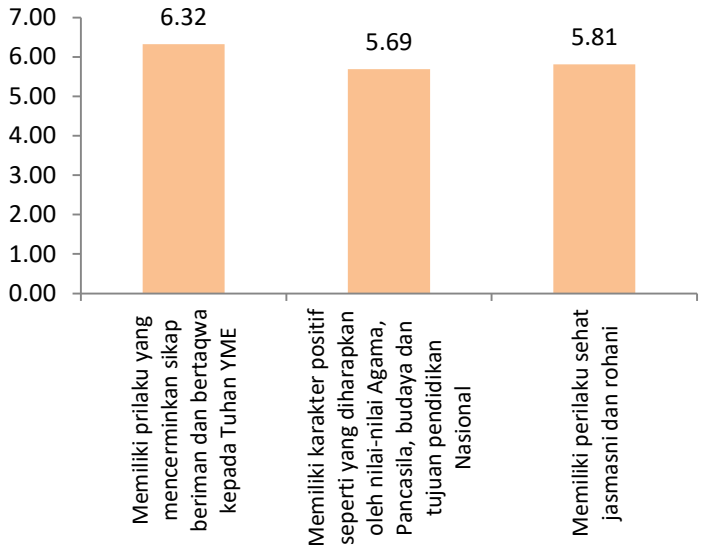

Grafik 3.5 Pemenuhan Dimensi Sikap

b. Pemenuhan Dimensi Pengetahuan

Dari 4 indikator yang membentuk dimensi ke-2 (lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan) diketahui bahwa indikator "lulusan memiliki kompetensi pengetahuan pada dimensi metakognitif" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 4,60, sedangkan indikator "lulusan memiliki kompetensi pengetahuan pada dimensi kritis" dan pemenuhan paling rendah yakni sebesar 4,49.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemenuhan dimensi ke-2 (lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan) dari standar kompetensi lulusan satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai kategori Menuju SNP 3 dengan skor rerata 4,55. Secara grafis pemenuhan dimensi pengetahuan pada masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

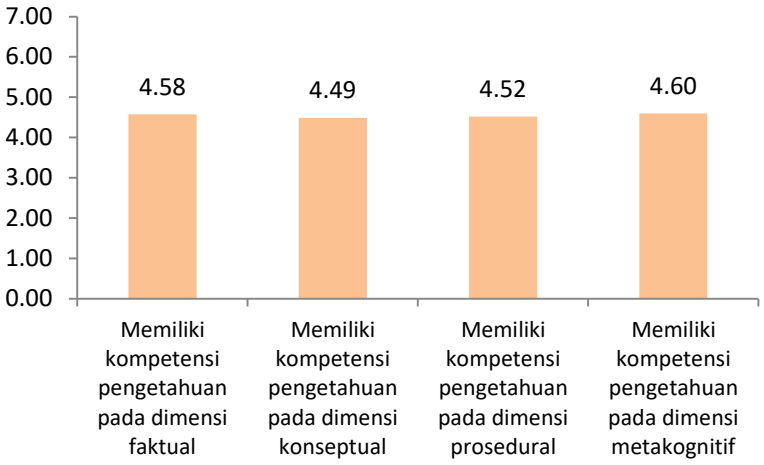

Grafik 3.6 Pemenuhan Dimensi Pengetahuan

c. Pemenuhan Dimensi Keterampilan

Dari 6 indikator yang membentuk dimensi ke-3 (lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan) diketahui bahwa indikator "lulusan memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif" dan "lulusan memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 6,47, sedangkan indikator "lulusan memiliki kemampuan berpikir dan bertindak kritis serta mandiri" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 5,99.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemenuhan dimensi ke-3 (lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan) dari standar kompetensi lulusan satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai kategori Menuju SNP 4 dengan skor rerata 6,22. Secara grafis pemenuhan dimensi keterampilan pada masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

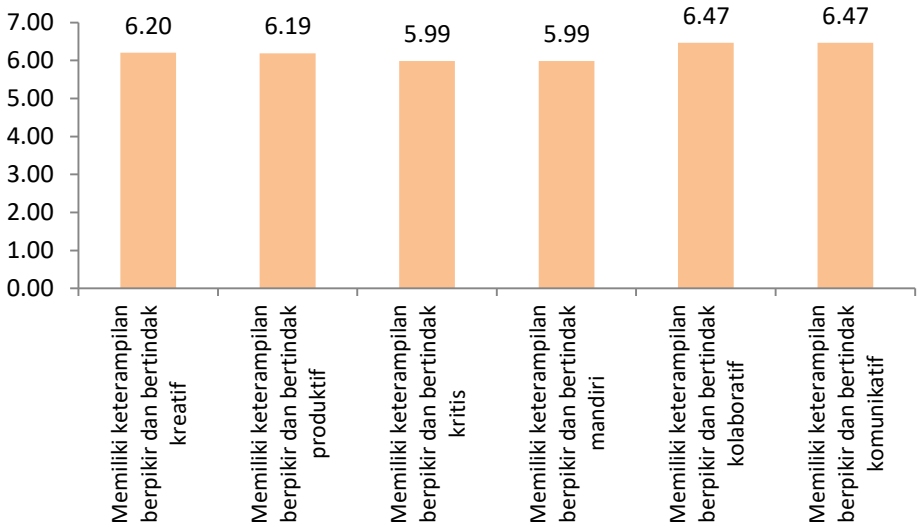

Grafik 3.7 Pemenuhan Dimensi Keterampilan

2. Pemenuhan Standar Isi

Dari hasil analisis diketahui bahwa Pemenuhan standar isi satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan, secara umum baru mencapai kategori Menuju SNP 4 dengan skor 6,09 Dari 3 dimensi yang membentuk standar isi, diketahui bahwa dimensi ke-2 yakni "rancangan mata pelajaran dan beban belajar" menjadi dimensi dengan skor pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 6,63, sedangkan dimensi ke-3 yakni dimensi "kurikulum" menjadi dimensi dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 5,30.

Secara grafis pemenuhan standar isi pada masing-masing dimensi dapat dijelaskan sebagai berikut:

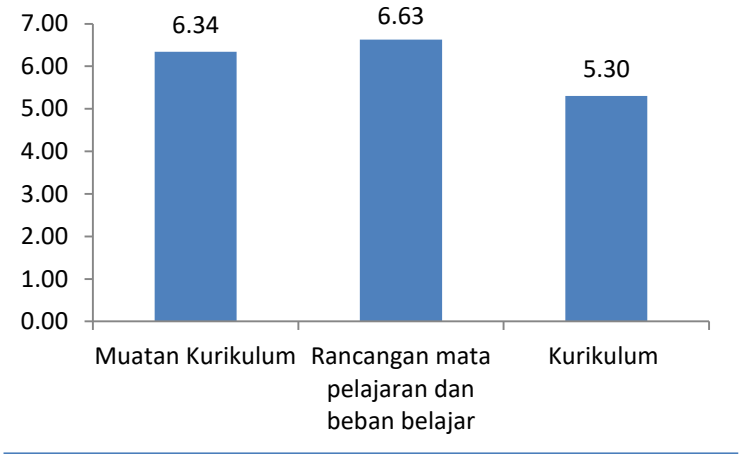

Grafik 3.8 Pemenuhan Standar Isi

Pemenuhan standar isi berdasarkan dimensi setiap kabupaten/kota rata-rata baru memenuhi kategori menuju SNP 4, hal ini dapat dilihat pada Grafik 3.9 berikut:

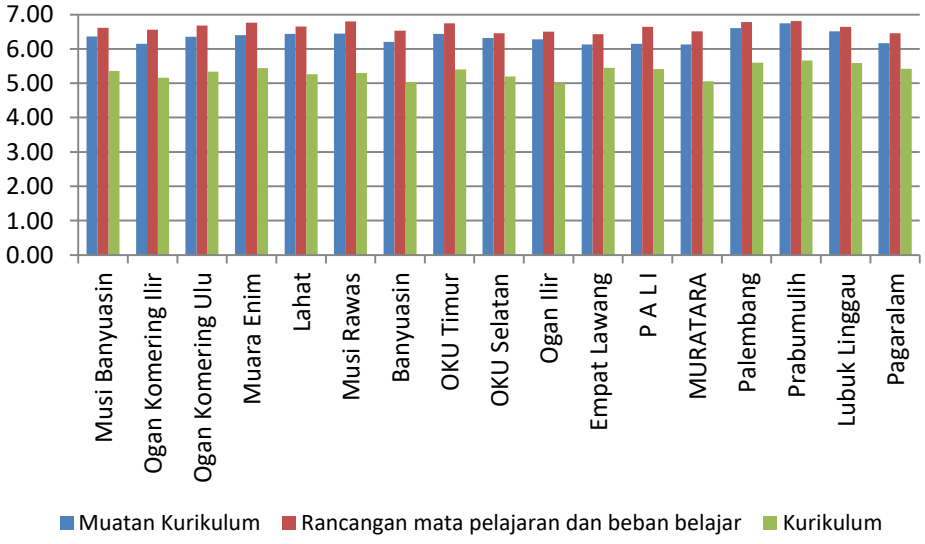

Grafik 3.9 Pemenuhan Standar Isi Setiap Kabupaten/Kota

a. Pemenuhan Dimensi Muatan Kurikulum

Dari 3 indikator yang membentuk dimensi ke-1 (muatan kurikulum) diketahui bahwa indikator "mengandung muatan nasional" menjadi indikator dengan skor

pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 6,67, sedangkan indikator "muatan lokal" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 5,89.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemenuhan dimensi ke-1 (muatan kurikulum) dari standar isi satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai kategori Menuju SNP 4 dengan skor rerata 6,34. Secara grafis pemenuhan dimensi muatan kurikulum pada masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

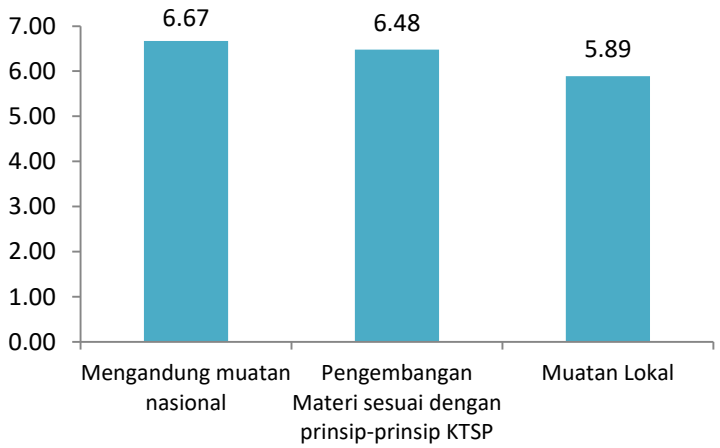

Grafik 3.10 Pemenuhan Dimensi Muatan Kurikulum

b. Pemenuhan Dimensi Rancangan Mata Pelajaran dan Beban Belajar

Dari 3 indikator yang membentuk dimensi ke-2 (rancangan mata pelajaran dan beban belajar) diketahui bahwa indikator "daftar mata pelajaran dan alokasi waktu" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 6,67, sedangkan indikator "jam pelajaran per minggu" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 6,59.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemenuhan dimensi ke-2 (rancangan mata pelajaran dan beban belajar) dari standar isi satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai kategori Menuju SNP 4 dengan skor rerata 6,63. Secara grafis pemenuhan dimensi rancangan mata pelajaran dan beban belajar pada masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

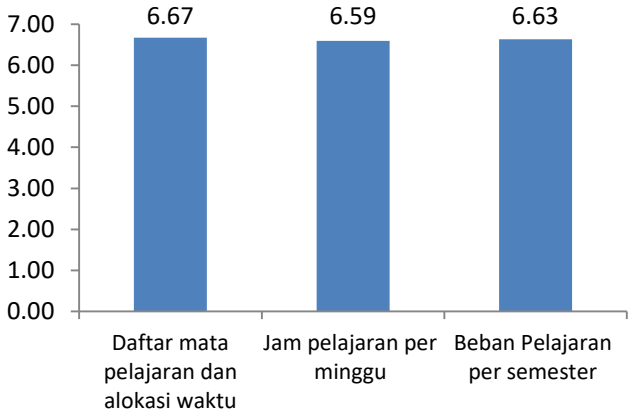

Grafik 3.11 Pemenuhan Dimensi Rancangan Mata Pelajaran dan Beban Belajar

c. Pemenuhan Dimensi Kurikulum

Dari 3 indikator yang membentuk dimensi ke-3 (kurikulum) diketahui bahwa indikator "perangkat pengembangan KTSP" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 6,23, sedangkan indikator "sosialisasi perangkat kurikulum" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 3,99.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemenuhan dimensi ke-3 (kurikulum) dari standar isi satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai kategori Menuju SNP 3 dengan skor rerata 5,30 Secara grafis pemenuhan dimensi kurikulum pada masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

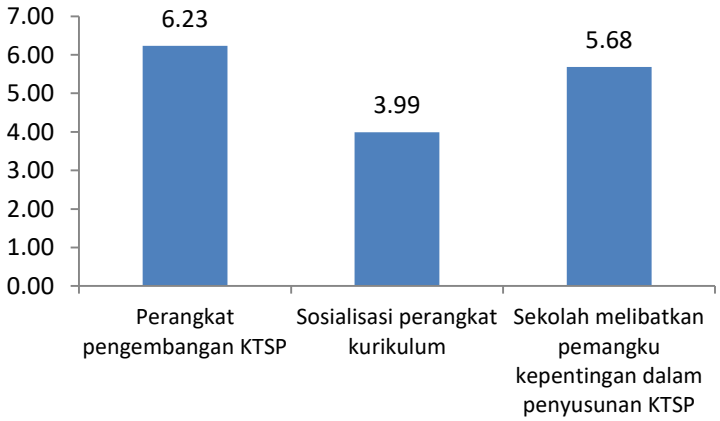

Grafik 3.12 Pemenuhan Dimensi Kurikulum

3. Pemenuhan Standar Proses

Dari hasil analisis diketahui bahwa Pemenuhan standar proses satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan, secara umum baru mencapai kategori Menuju SNP 4 dengan skor 5,96. Dari 3 dimensi yang membentuk standar proses, diketahui bahwa dimensi ke-1 yakni "perencanaan pembelajaran" menjadi dimensi dengan skor pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 6,34, sedangkan dimensi ke-3 yakni dimensi "pengawasan proses pembelajaran" menjadi dimensi dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 5,66.

Secara grafis pemenuhan standar proses pada masing-masing dimensi dapat dijelaskan sebagai berikut:

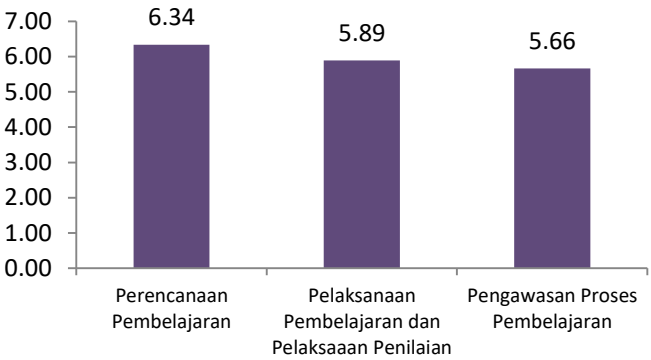

Grafik 3.13 Pemenuhan Standar Proses

Pemenuhan standar proses berdasarkan dimensi setiap kabupaten/kota rata-rata semua dimensi baru memenuhi kategori menuju SNP 4, hal ini dapat dilihat pada Grafik 3.14 berikut:

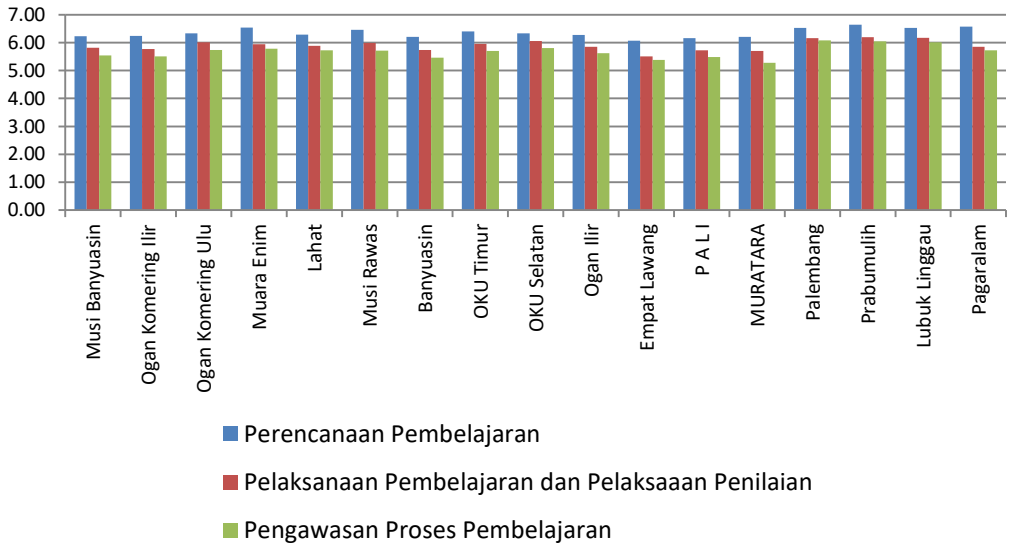

Grafik 3.14 Pemenuhan Standar Proses Setiap Kabupaten/Kota

a. Pemenuhan Dimensi Perencanaan Pembelajaran

Dari 3 indikator yang membentuk dimensi ke-1 (perencanaan pembelajaran) diketahui bahwa indikator "guru membuat RPP" dan "isi RPP sesuai dengan kurikulum nasional" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 6,36, sedangkan indikator "RPP dievaluasi oleh kepala sekolah" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 6,29.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemenuhan dimensi ke-1 (perencanaan pembelajaran) dari standar proses satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai kategori Menuju SNP 4 dengan skor rerata 6,34. Secara grafis pemenuhan dimensi perencanaan pembelajaran pada masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

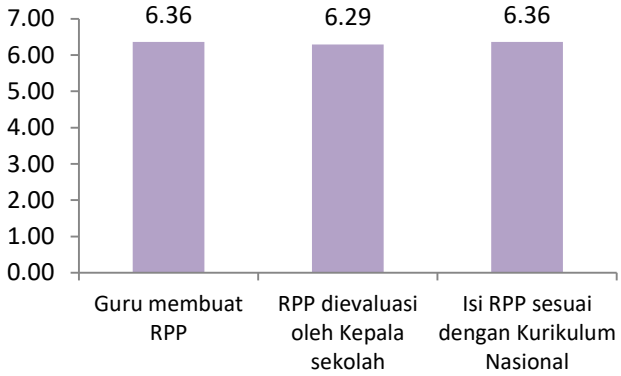

Grafik 3.15 Pemenuhan Dimensi Perencanaan Proses Pembelajaran

b. Pemenuhan Dimensi Pelaksanaan Pembelajaran dan Penilaian

Dari 3 indikator yang membentuk dimensi ke-2 (pelaksanaan pembelajaran dan penilaian) diketahui bahwa indikator "pemenuhan persyaratan" menjadi indikator

dengan skor pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 6,20, sedangkan indikator "pelaksanaan penilaian" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 5,51.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemenuhan dimensi ke-2 (pelaksanaan pembelajaran dan penilaian) dari standar proses satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai kategori Menuju SNP 4 dengan skor rerata 5,89. Secara grafis pemenuhan dimensi pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pada masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

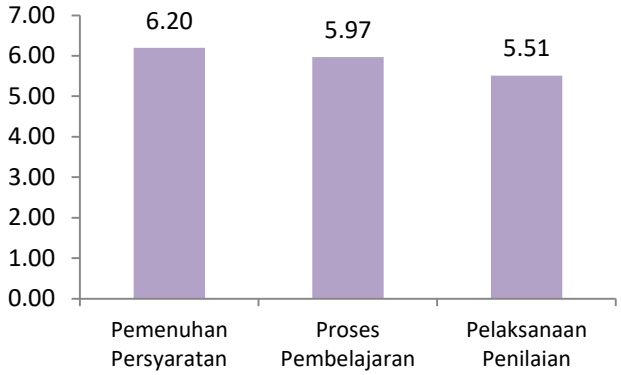

Grafik 3.16 Pemenuhan Dimensi Pelaksanaan Pembelajaran

c. Pemenuhan Dimensi Pengawasan Proses Pembelajaran

Dari 3 indikator yang membentuk dimensi ke-3 (pengawasan proses pembelajaran) diketahui bahwa indikator "prinsip pengawasan" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 6.03, sedangkan indikator "proses pengawasan" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 5,40.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemenuhan dimensi ke-3 (pengawasan proses pembelajaran) dari standar proses satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai kategori Menuju SNP 4 dengan skor rerata 5,66. Secara grafis pemenuhan dimensi pengawasan proses pembelajaran pada masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

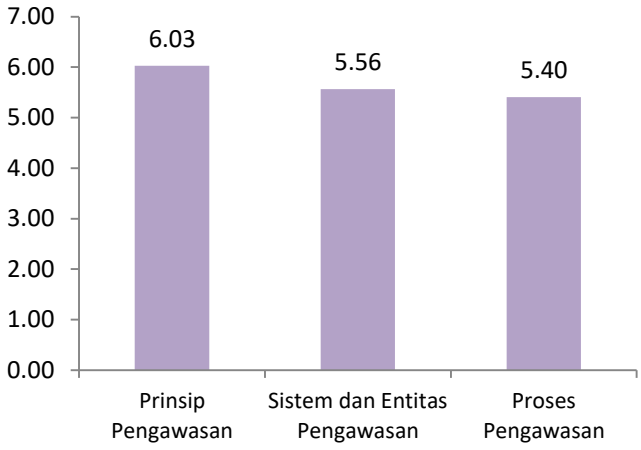

Grafik 3.17 Pemenuhan Dimensi Pengawasan Proses Pembelajaran

4. Pemenuhan Standar Penilaian Pendidikan

Dari hasil analisis diketahui bahwa Pemenuhan standar penilaian pendidikan satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan, secara umum baru mencapai kategori Menuju SNP 4 dengan skor 5,84. Dari 7 dimensi yang membentuk standar penilaian pendidikan, diketahui bahwa dimensi ke-4 yakni "prinsip penilaian pendidikan" menjadi dimensi dengan skor pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 6,57, sedangkan dimensi ke-3 yakni dimensi "manfaat penilaian pendidikan" menjadi dimensi dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 5,28.

Secara grafis pemenuhan standar penilaian pendidikan pada masing-masing dimensi dapat dijelaskan sebagai berikut:

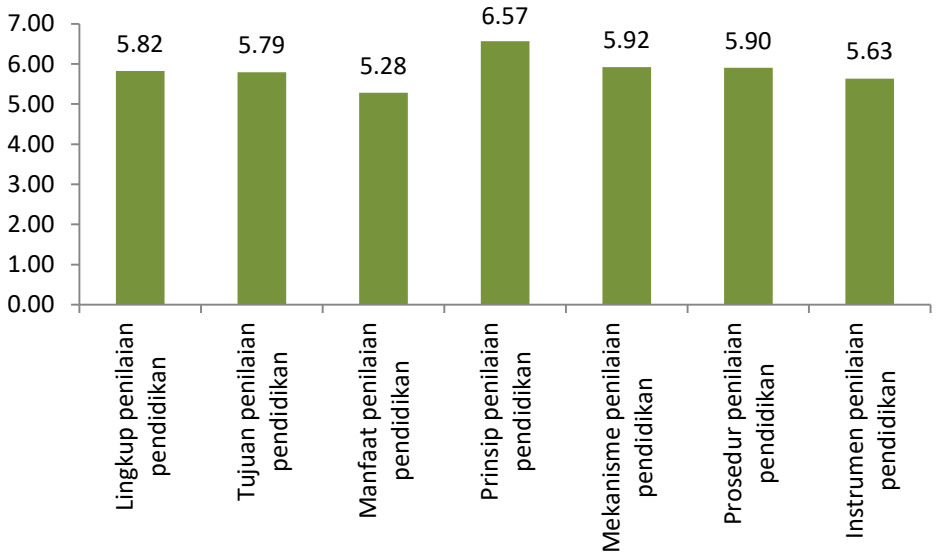

Grafik 3.18 Pemenuhan Standar Penilaian Pendidikan

Pemenuhan standar penilaian pendidikan berdasarkan dimensi setiap kabupaten/kota baru memenuhi kategori menuju SNP 4, hal ini dapat dilihat pada Grafik 3.19 berikut:

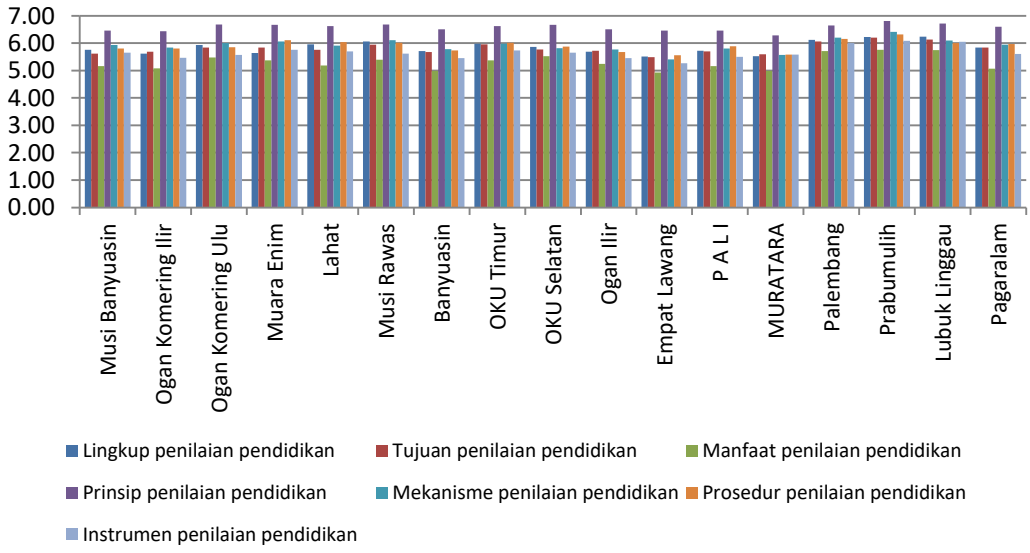

Grafik 3.19 Pemenuhan Standar Penilaian Pendidikan Setiap Kabupaten/Kota

a. Pemenuhan Dimensi Lingkup Penilaian Pendidikan

Dari 3 indikator yang membentuk dimensi ke-1 (lingkup penilaian pendidikan) diketahui bahwa indikator "penilaian hasil belajar oleh pendidik" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 6,05, sedangkan indikator "penilaian hasil belajar oleh pemerintah" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 5,59.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemenuhan dimensi ke-1 (lingkup penilaian pendidikan) dari standar penilaian pendidikan satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai kategori Menuju SNP 4 dengan skor rerata 5,82. Secara grafis pemenuhan dimensi lingkup penilaian pendidikan pada masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

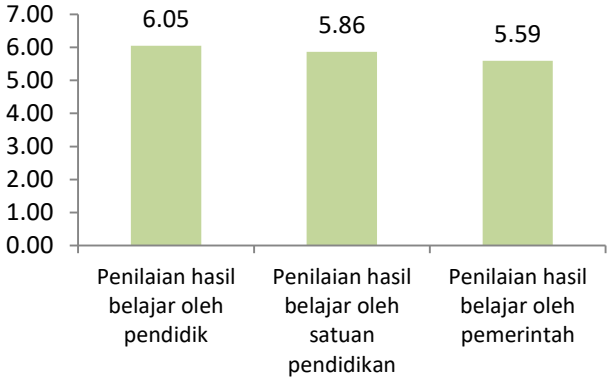

Grafik 3.20 Pemenuhan Dimensi Lingkup Penilaian Pendidikan

b. Pemenuhan Dimensi Tujuan Penilaian Pendidikan

Dari 3 indikator yang membentuk dimensi ke-2 (tujuan penilaian pendidikan) diketahui bahwa indikator "tujuan penilaian hasil belajar oleh pendidik" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 5,99, sedangkan indikator "tujuan penilaian hasil belajar oleh pemerintah" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 5,61.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemenuhan dimensi ke-2 (tujuan penilaian pendidikan) dari standar penilaian pendidikan satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai kategori Menuju SNP 4 dengan skor rerata 5,79. Secara grafis pemenuhan dimensi tujuan penilaian pendidikan pada masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

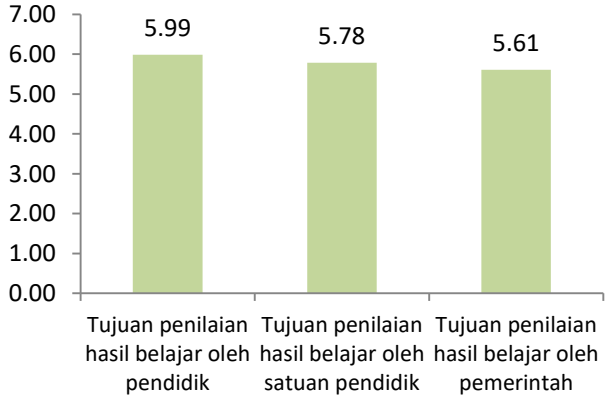

Grafik 3.21 Pemenuhan Dimensi Tujuan Penilaian Pendidikan

c. Pemenuhan Dimensi Manfaat Penilaian Pendidikan

Dari 3 indikator yang membentuk dimensi ke-3 (manfaat penilaian pendidikan) diketahui bahwa indikator "manfaat penilaian hasil belajar oleh pendidik" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 5,37, sedangkan indikator "manfaat penilaian hasil belajar oleh pemerintah" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 5,18.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemenuhan dimensi ke-3 (manfaat penilaian pendidikan) dari standar penilaian pendidikan satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai kategori Menuju SNP 4 dengan skor rerata 5,28. Secara grafis pemenuhan dimensi manfaat penilaian pendidikan pada masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

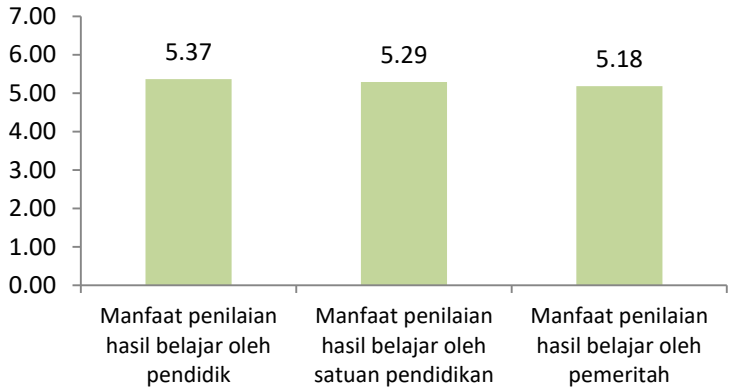

Grafik 3.22 Pemenuhan Dimensi Manfaat Penilaian Pendidikan

d. Pemenuhan Dimensi Prinsip Penilaian Pendidikan

Dari 9 indikator yang membentuk dimensi ke-4 (prinsip penilaian pendidikan) diketahui bahwa indikator "adil" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 6,67, sedangkan indikator "terbuka" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 6,46.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemenuhan dimensi ke-4 (prinsip penilaian pendidikan) dari standar penilaian pendidikan satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai kategori Menuju SNP 4 dengan skor rerata 6,57. Secara grafis pemenuhan dimensi prinsip penilaian pendidikan pada masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

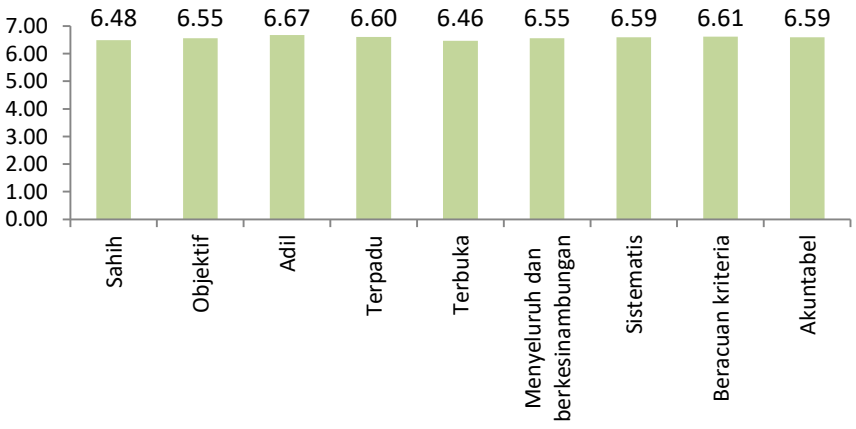

Grafik 3.23 Pemenuhan Dimensi Prinsip Penilaian Pendidikan

e. Pemenuhan Dimensi Mekanisme Penilaian Pendidikan

Dari 2 indikator yang membentuk dimensi ke-5 (mekanisme penilaian pendidikan) diketahui bahwa indikator "mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 6,03, sedangkan indikator "mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 5,81.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemenuhan dimensi ke-5 (mekanisme penilaian pendidikan) dari standar penilaian pendidikan satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai kategori Menuju SNP 4 dengan skor rerata 5,92. Secara grafis pemenuhan dimensi mekanisme penilaian pendidikan pada masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

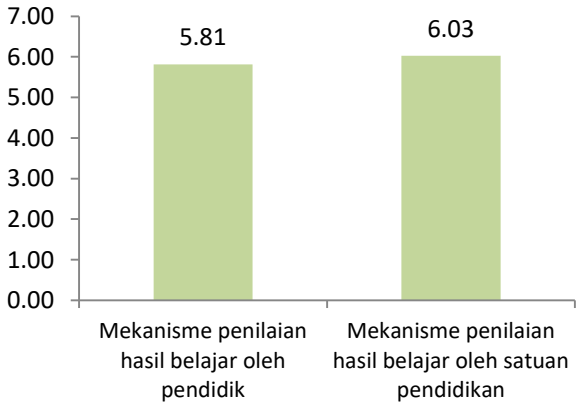

Grafik 3.24 Pemenuhan Dimensi Mekanisme Penilaian Pendidikan

f. Pemenuhan Dimensi Prosedur Penilaian Pendidikan

Dari 2 indikator yang membentuk dimensi ke-6 (prosedur penilaian pendidikan) diketahui bahwa indikator "prosedur penilaian oleh pendidik" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 5,93, sedangkan indikator "prosedur penilaian oleh satuan pendidikan" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 5,87.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemenuhan dimensi ke-6 (prosedur penilaian pendidikan) dari standar penilaian pendidikan satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai kategori Menuju SNP 4 dengan skor rerata 5,90. Secara grafis pemenuhan dimensi prosedur penilaian pendidikan pada masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

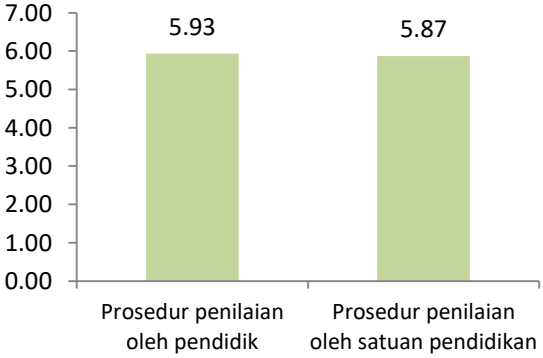

Grafik 3.25 Pemenuhan Dimensi Prosedur Penilaian Pendidikan

g. Pemenuhan Dimensi Instrumen Penilaian Pendidikan

Dari 2 indikator yang membentuk dimensi ke-7 (instrumen penilaian pendidikan) diketahui bahwa indikator "instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 5,80, sedangkan indikator "instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 5,47.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemenuhan dimensi ke-7 (instrumen penilaian pendidikan) dari standar penilaian pendidikan satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai kategori Menuju SNP 4 dengan skor rerata 5,63. Secara grafis pemenuhan dimensi penilaian pendidikan pada masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

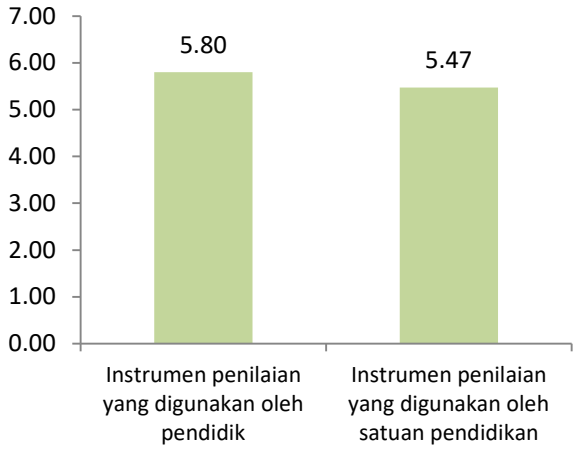

Grafik 3.26 Pemenuhan Dimensi Instrumen Penilaian Pendidikan

5. Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dari hasil analisis diketahui bahwa Pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan, secara umum baru mencapai kategori Menuju SNP 4 dengan skor 5,02. Dari 5 dimensi yang membentuk standar pendidik dan tenaga kependidikan, diketahui bahwa dimensi ke-1 yakni "kepala sekolah" menjadi dimensi dengan skor pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 5,75, sedangkan dimensi ke-5 yakni dimensi "tenaga laboratorium" menjadi dimensi dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 1,43.

Secara grafis pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan pada masing-masing dimensi dapat dijelaskan sebagai berikut:

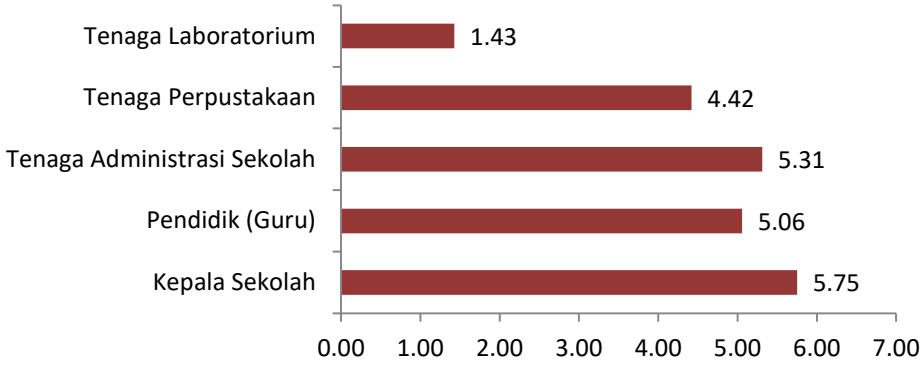

Grafik 3.27 Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan dimensi setiap kabupaten/kota rata-rata baru memenuhi kategori menuju SNP 3, pemenuhan terendah pada dimensi "tenaga laboratorium", hal ini dapat dilihat pada Grafik 3.28 berikut:

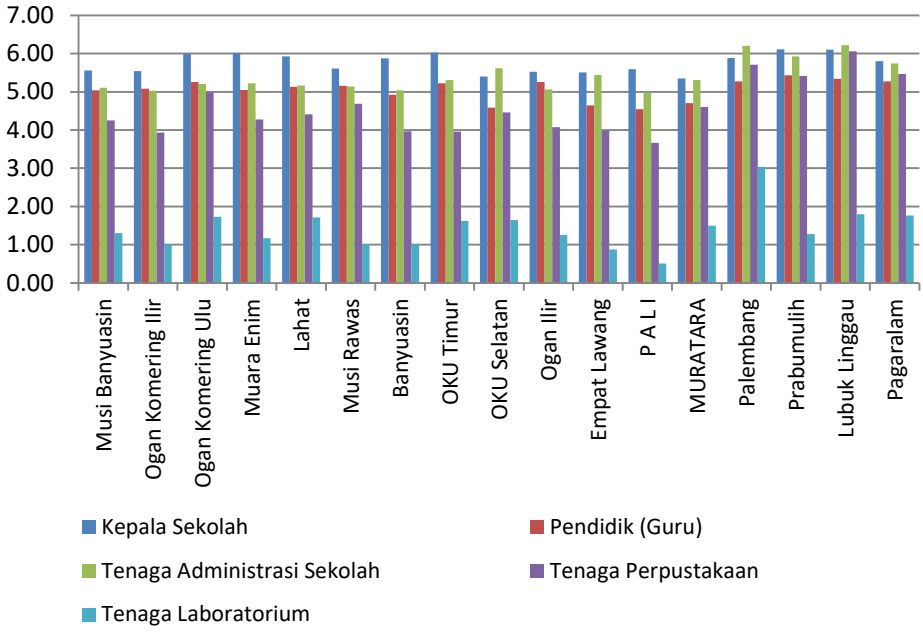

Grafik 3.28 Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Setiap Kabupaten/Kota

a. Pemenuhan Dimensi Kepala Sekolah

Dari 2 indikator yang membentuk dimensi ke-1 (kepala sekolah) diketahui bahwa indikator "kompetensi kepala sekolah" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 6,66, sedangkan indikator "kualifikasi kepala sekolah" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 4,84.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemenuhan dimensi ke-1 (kepala sekolah) dari standar pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai

kategori Menuju SNP 4 dengan skor rerata 5,75. Secara grafis pemenuhan dimensi kepala sekolah pada masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

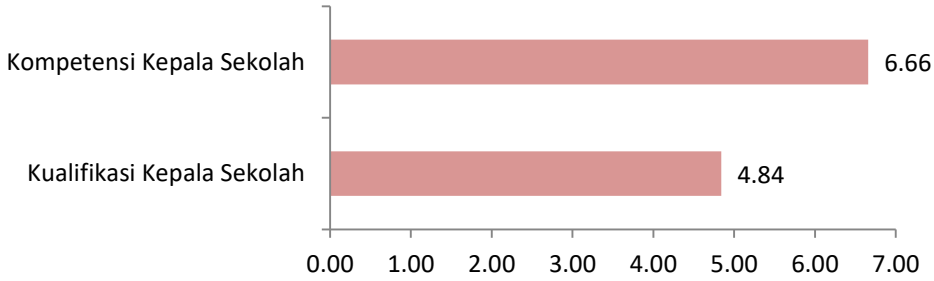

Grafik 3.29 Pemenuhan Dimensi Kepala Sekolah

Pemenuhan dimensi "kepala sekolah" berdasarkan indikator setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada Grafik 3.30 berikut:

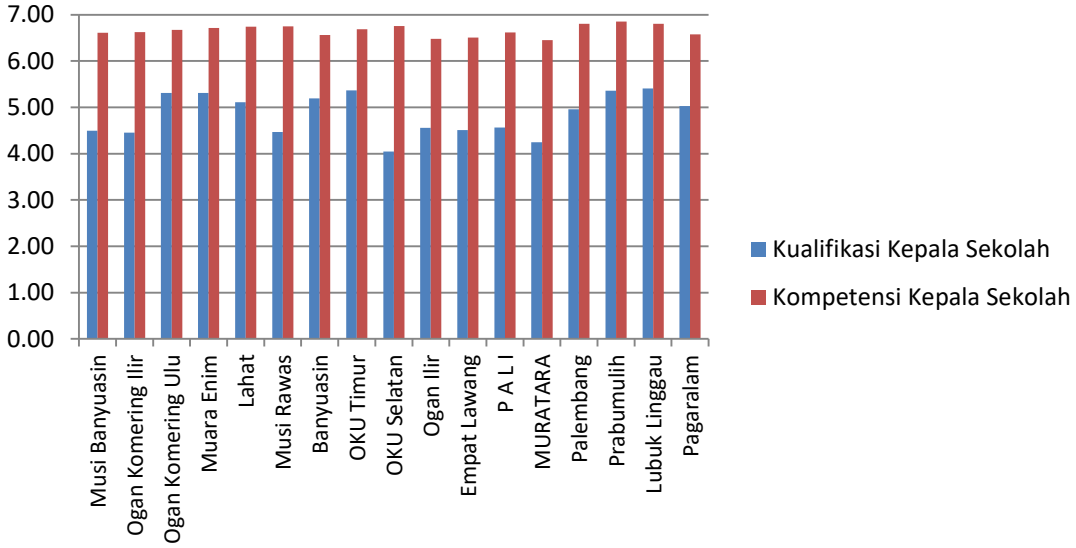

Grafik 3.30 Pemenuhan Dimensi Kepala Sekolah

Terkait dengan indikator "kualifikasi kepala sekolah" dapat dilihat bahwa dari 3 sub indikator yang membentuk indikator "kualifikasi kepala sekolah" diketahui hanya 1 sub indikator yang memenuhi kategori Menuju SNP yaitu "memiliki kualifikasi akademik sarjana(S1) atau diploma empat D-IV" (6,72), dan "memiliki sertifikat sebagai guru" baru memenuhi kategori Menuju SNP 4 (5,5), sedangkan "memiliki sertifikat kepala sekolah" (2,25) baru mencapai kategori menuju SNP 2. Secara grafis pemenuhan indikator kualifikasi kepala sekolah pada masing-masing sub indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

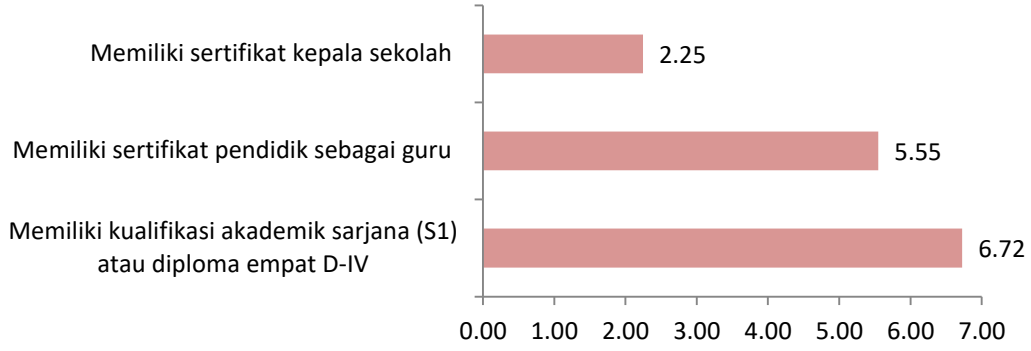

Grafik 3.31 Pemenuhan Indikator Kualifikasi Kepala Sekolah

Pemenuhan indikator "kualifikasi kepala sekolah" berdasarkan sub indikator setiap kabupaten/kota diketahu bahwa indikator "kualifikasi kepala sekolah" satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan yang pemenuhannya masih rendah yaitu sub indikator "sertifikasi guru" dan "sertifikat kepala sekolah", hal ini dapat dilihat pada Grafik 3.32 berikut:

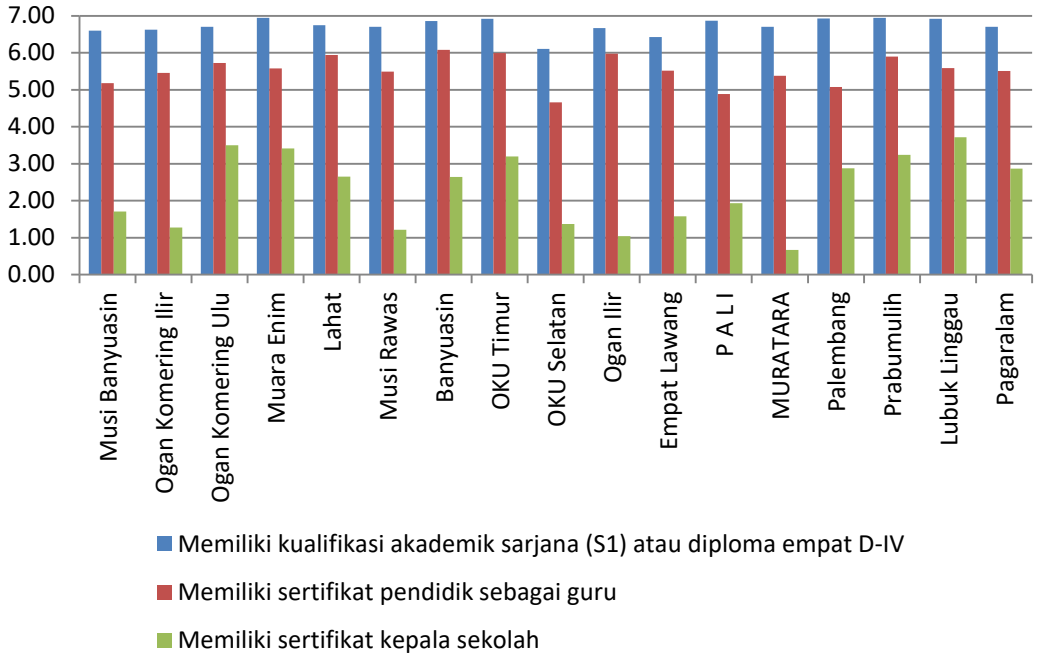

Grafik 3.32 Pemenuhan Indikator Kualifikasi Kepala Sekolah

Terkait dengan indikator "kompetensi kepala sekolah" dapat dilihat bahwa dari 5 sub indikator yang membentuk indikator "kompetensi kepala sekolah" diketahui baru 3 sub indikator yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) yaitu kompetensi kepribadian (6,91), kompetensi manajerial (6,72), kompetensi sosial (6,68) sedangkan lainnya baru mencapai kategori Menuju SNP 4, yaitu: kompetensi kewirausahaan (6,34), kompetensi supervisi (6,64).Secara grafis pemenuhan indikator kompetensi kepala sekolah pada masing-masing sub indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

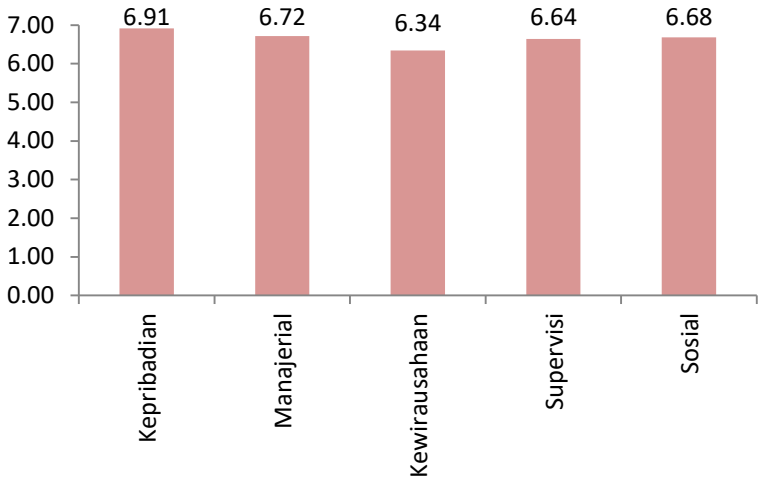

Grafik 3.33 Pemenuhan Indikator Kompetensi Kepala Sekolah

Pemenuhan indikator "kompetensi kepala sekolah" berdasarkan sub indikator setiap kabupaten/kota diketahui bahwa indikator "kompetensi kepala sekolah" satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan pemenuhan standar terendah yaitu sub indikator "kompetensi kewirausahaan", hal ini dapat dilihat pada Grafik 3.34 berikut:

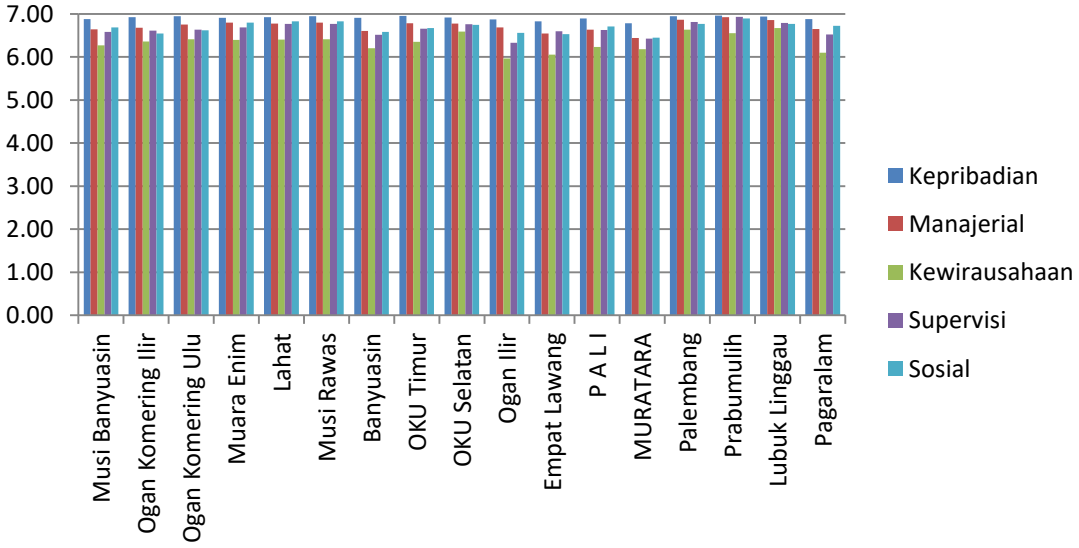

Grafik 3.34 Pemenuhan Indikator Kompetensi Kepala Sekolah

b. Pemenuhan Dimensi Pendidik

Dari 3 indikator yang membentuk dimensi ke-2 (pendidik (guru)) diketahui bahwa indikator "pemenuhan jumlah guru" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 6,06, sedangkan indikator "kualifikasi guru" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 3,84.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemenuhan dimensi ke-2 (pendidik) dari standar pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai kategori Menuju SNP

3 dengan skor rerata 5.06. Secara grafis pemenuhan dimensi pendidik pada masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

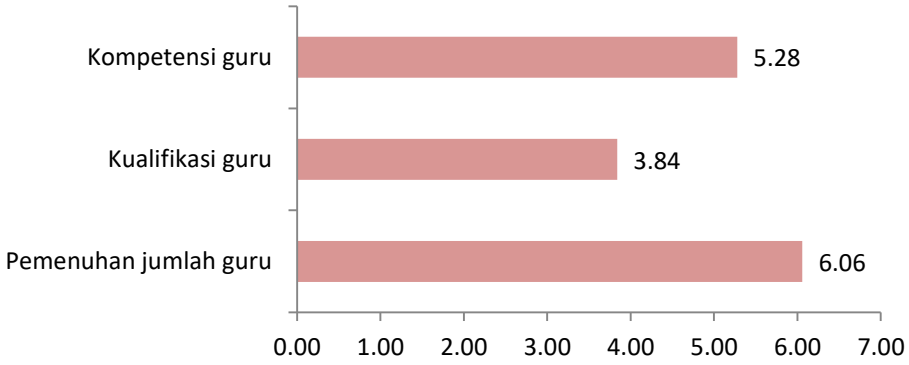

Grafik 3.35 Pemenuhan Dimensi Pendidik (Guru)

Pemenuhan dimensi "pendidik (guru)" berdasarkan indikator setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada Grafik 3.36 berikut:

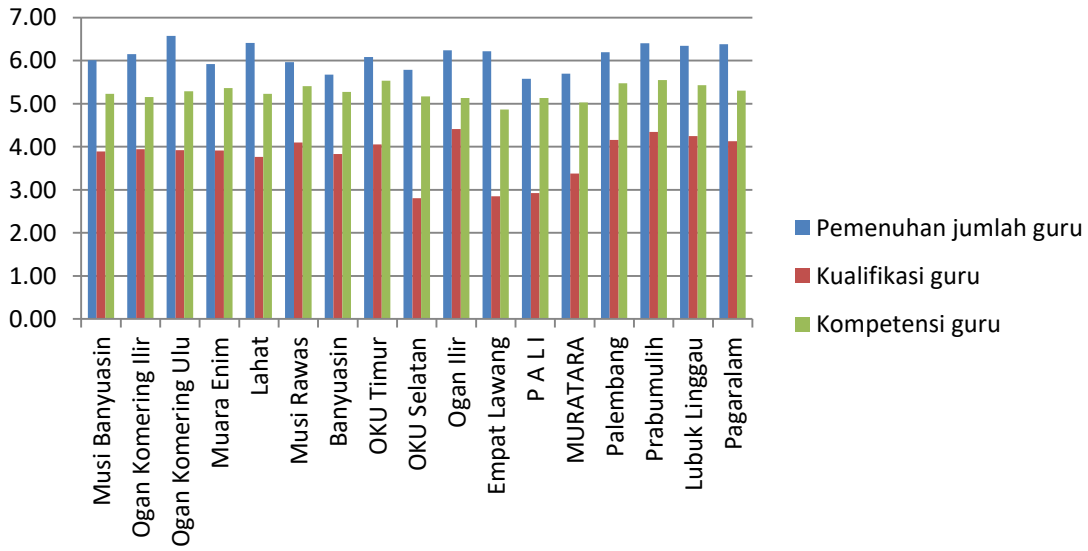

Grafik 3.36 Pemenuhan Dimensi Pendidik (Guru) Setiap Kabupaten/Kota

Terkait dengan indikator "pemenuhan jumlah guru" dapat dilihat bahwa dari 2 sub indikator yang membentuk indikator "pemenuhan jumlah guru" diketahui kedua sub indikator tersebut masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), dimana sub indikator "rasio guru kelas terhadap rombongan belajar"(6,47) dan sub indikator "tersedia guru agama dan PJOK"(5,65) baru mencapai kategori Menuju SNP 4. Secara grafis pemenuhan indikator jumlah guru pada masing-masing sub indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

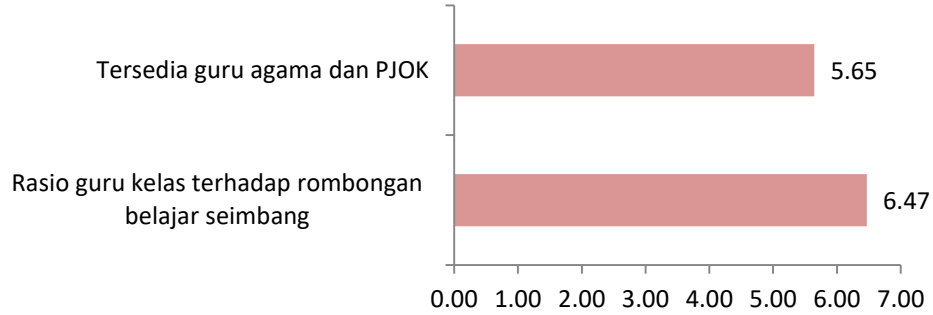

Grafik 3.37 Pemenuhan Indikator Jumlah Guru

Pemenuhan indikator "jumlah pendidik (guru)" berdasarkan sub indikator setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada Grafik 3.38 berikut:

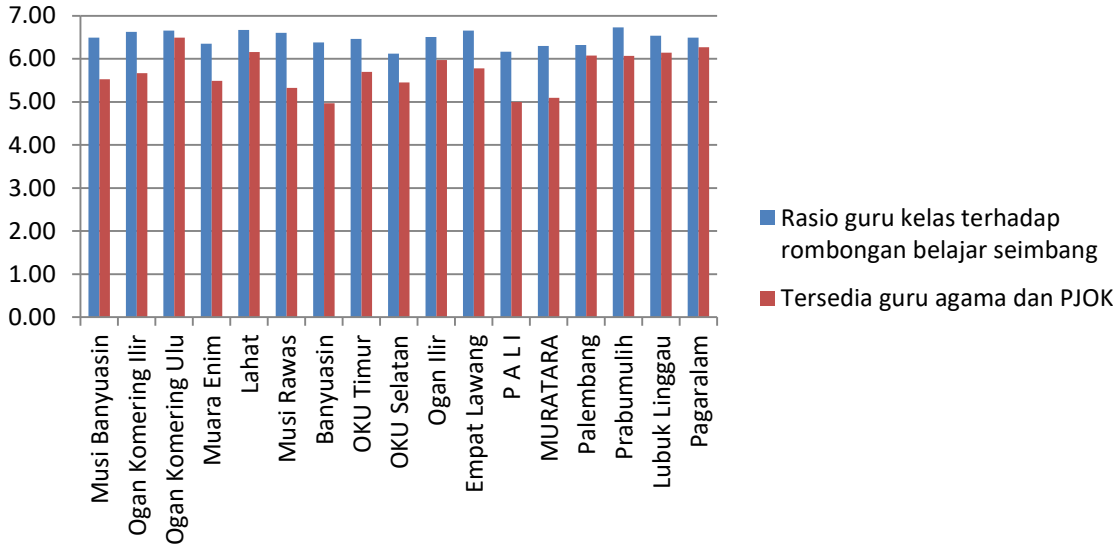

Grafik 3.38 Pemenuhan Indikator Jumlah Guru Setiap Kabupaten/Kota

Demikian pula dengan indikator "kualifikasi guru", dari Grafik 3.39 dapat dilihat bahwa dari 2 sub indikator yang membentuk indikator "kualifikasi guru" diketahui kedua sub indikator tersebut masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), dimana sub indikator "kualifikasi akademik" baru mencapai kategori Menuju SNP 4 (5,10) dan sub indikator "sertifikat pendidik" baru mencapai kategori Menuju SNP 2 (2,58). Secara grafis pemenuhan indikator "kualifikasi guru" pada masing-masing sub indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

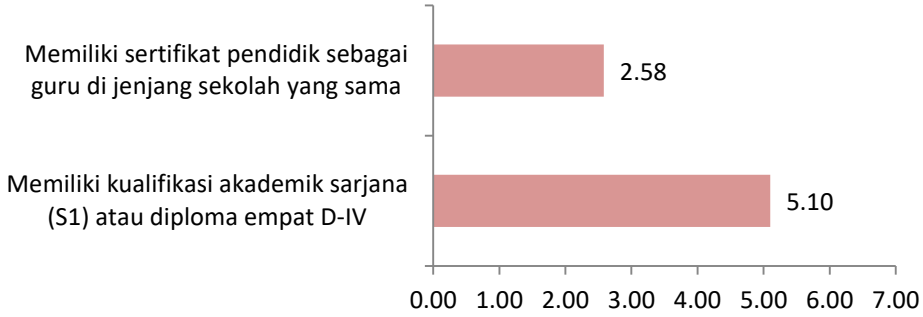

Grafik 3.39 Pemenuhan Indikator Kualifikasi Pendidik (Guru)

Pemenuhan indikator "kualifikasi pendidik (guru)" berdasarkan sub indikator setiap kabupaten/kota pemenuhannya yang sangat rendah adalah kepemilikan sertifikat pendidik oleh guru, hal ini dapat dilihat pada Grafik 3.40 berikut:

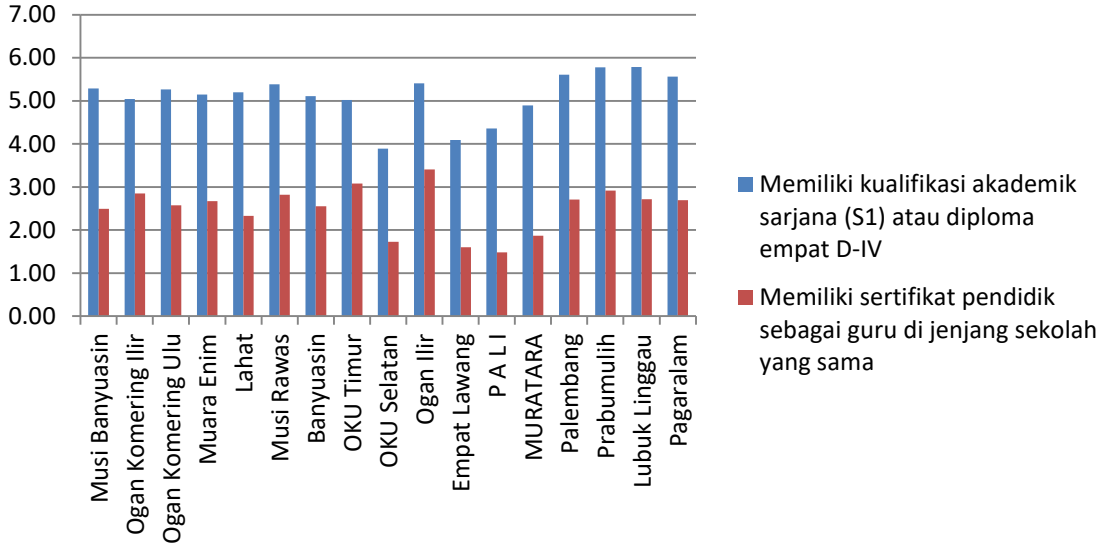

Grafik 3.40 Pemenuhan Indikator Kualifikasi Pendidik (Guru) Setiap Kabupaten/Kota

Sementara itu terkait dengan indikator "kompetensi guru", dari grafik di bawah ini dapat dilihat bahwa dari 4 sub indikator yang membentuk indikator "kompetensi guru" diketahui ada dua sub indikator yang baru mencapai kategori Menuju SNP 4, yaitu: kompetensi kepribadian (6,30) dan kompetensi sosial (6,22), sedangkan dua sub indikator lainnya baru mencapai kategori Menuju SNP 3, yaitu: kompetensi profesional (4,35) dan kompetensi pedagogik (4,24). Secara grafis pemenuhan indikator "kompetensi guru" pada masing-masing sub indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

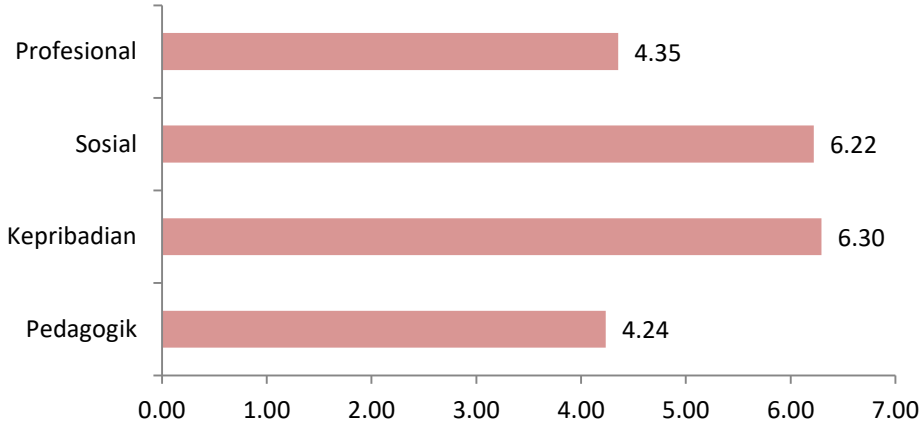

Grafik 3.41 Pemenuhan Indikator Kompetensi Pendidik (Guru)

Pemenuhan indikator "kompetensi pendidik (guru)" berdasarkan sub indikator setiap kabupaten/kota pemenuhannya yang masih rendah yaitu kompetensi pedagogik dan profesional, hal ini dapat dilihat pada Grafik 3.42 berikut:

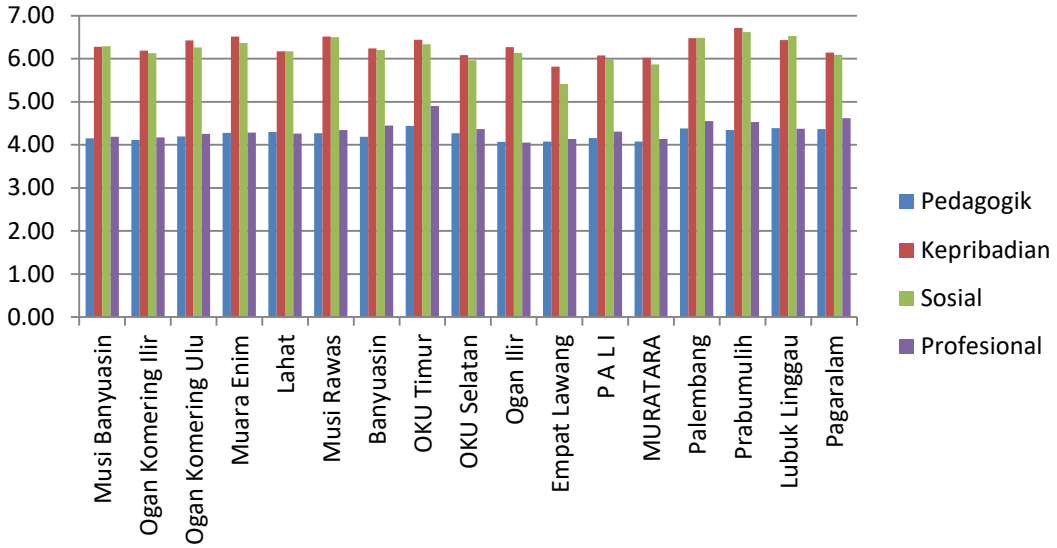

Grafik 3.42 Pemenuhan Indikator Kompetensi Pendidik (Guru) Setiap Kabupaten/Kota

c. Pemenuhan Dimensi Tenaga Administrasi Sekolah

Dari 3 indikator yang membentuk dimensi ke-3 (tenaga administrasi sekolah) diketahui bahwa indikator "pelaksana urusan administrasi" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 5,91, sedangkan indikator "petugas layanan khusus" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 3,36.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemenuhan dimensi ke-3 (tenaga administrasi sekolah) dari standar pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai kategori Menuju SNP 4 dengan skor rerata 5,31. Secara grafis pemenuhan dimensi

tenaga administrasi sekolah pada masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

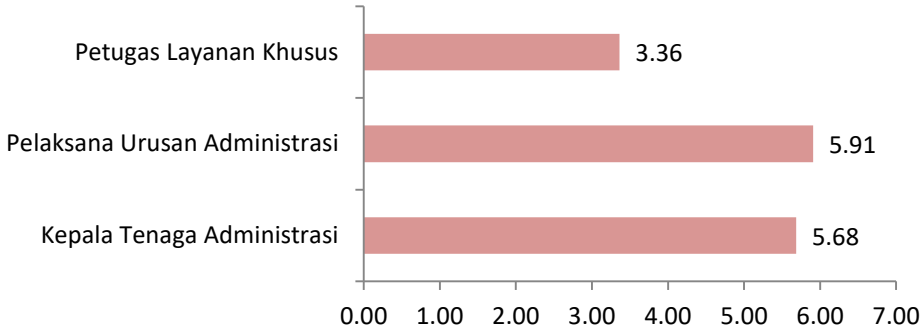

Grafik 3.43 Pemenuhan Dimensi Tenaga Administrasi Sekolah

Pemenuhan dimensi "petugas layanan khusus" berdasarkan indikator setiap kabupaten/kota diketahui bahwa rata-rata pemenuhan masih dibawah SNP, hal ini dapat dilihat pada Grafik 3.44 berikut:

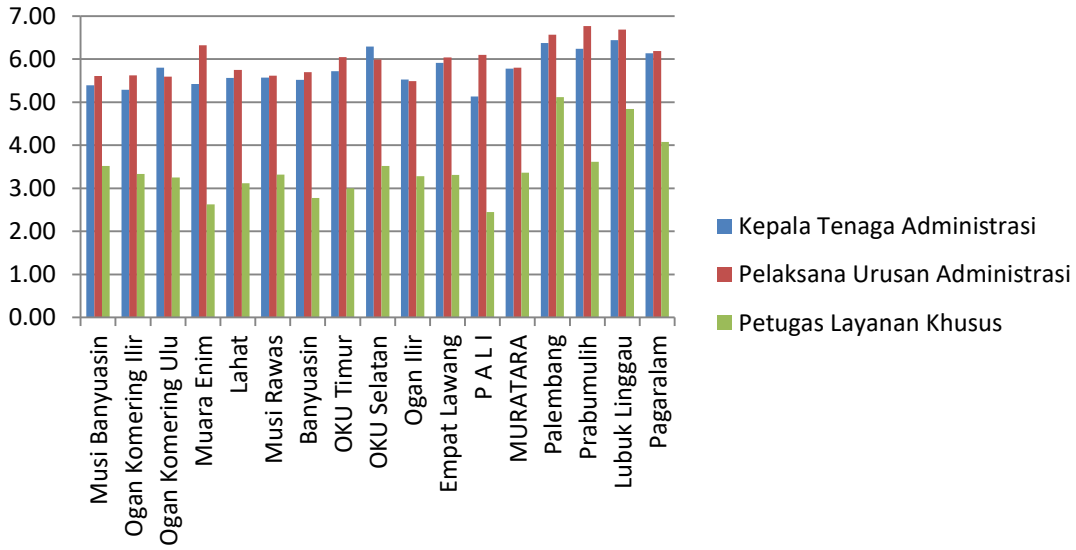

Grafik 3.44 Pemenuhan Dimensi Tenaga Administrasi Sekolah Setiap Kabupaten/Kota

Terkait dengan indikator "kepala tenaga administrasi" dapat dilihat bahwa dari 5 sub indikator yang membentuk indikator "pemenuhan kepala tenaga administrasi" diketahui kelima sub indikator tersebut masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), dimana semua sub indikator baru mencapai kategori Menuju SNP 4. Secara grafis pemenuhan indikator kepala tenaga administrasi pada masing-masing sub indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

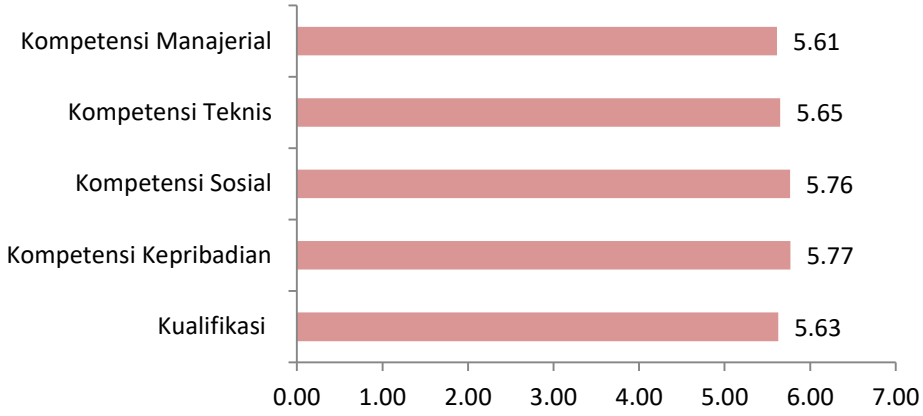

Grafik 3.45 Pemenuhan Indikator Kepala Tenaga Administrasi Sekolah

Pemenuhan indikator "kepala tenaga administrasi" berdasarkan sub indikator setiap kabupaten/kota rata-rata baru memenuhi kategori 4 seperti dapat dilihat pada Grafik 3.46 berikut:

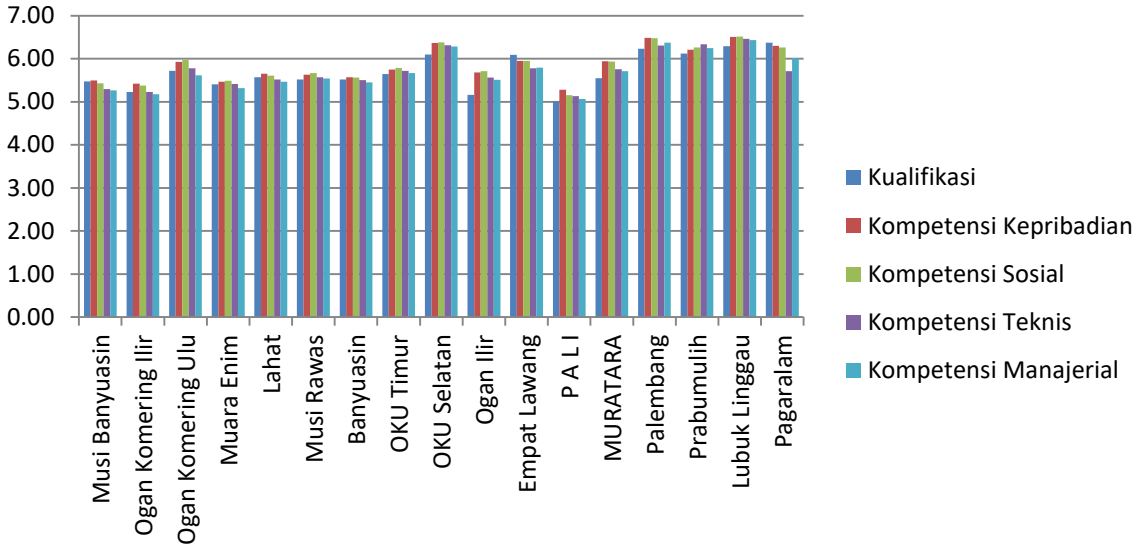

Grafik 3.46 Pemenuhan Indikator Kepala Tenaga Administrasi Sekolah Setiap Kabupaten/Kota

Demikian pula dengan indikator "pelaksana urusan administrasi", dari Grafik 3.47 dapat dilihat bahwa dari sub indikator yang membentuk indikator "pelaksana urusan administrasi umum" satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan diketahui sub indikator tersebut masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), dimana sub indikator baru memenuhi kategori Menuju SNP 4. Secara grafis pemenuhan indikator "pelaksana urusan administrasi" pada masing-masing sub indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

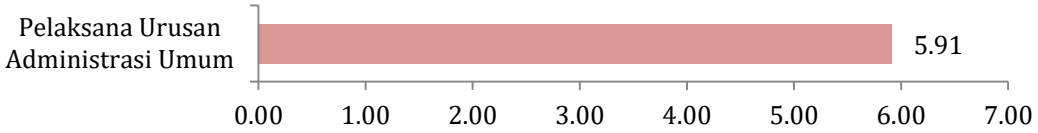

Grafik 3.47 Pemenuhan Indikator Pelaksana Urusan Administrasi

Pemenuhan pelaksana urusan administrasi berdasarkan sub indikator setiap kabupaten/kota rata-rata baru memenuhi kategori 4 seperti dapat dilihat pada Grafik 3.48 berikut:

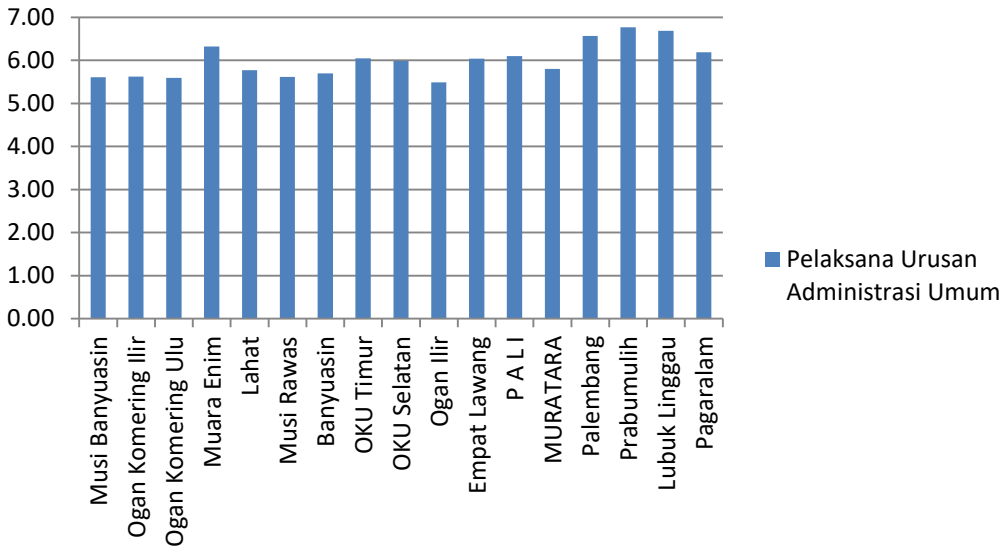

Grafik 3.48 Pemenuhan Indikator Pelaksana Urusan Administrasi Setiap Kabupaten/Kota

Sementara itu terkait dengan indikator "tenaga layanan khusus", dari grafik di bawah ini dapat dilihat bahwa dari 5 sub indikator yang membentuk indikator "tenaga layanan khusus" diketahui ada 1 sub indikator yang baru mencapai kategori Menuju SNP 4, yaitu: pemenuhan penjaga sekolah (5,12), sedangkan 1 sub indikator baru memenuhi kategori Menuju SNP 3 yaitu: tenaga kebersihan (3,71), sedangkan lainnya baru mencapai kategori Menuju SNP 2, yaitu: pemenuhan pesuruh (2,57),pengemudi (2,14) dan tukang kebun (3,27). Secara grafis pemenuhan indikator "tenaga layanan khusus" pada masing-masing sub indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

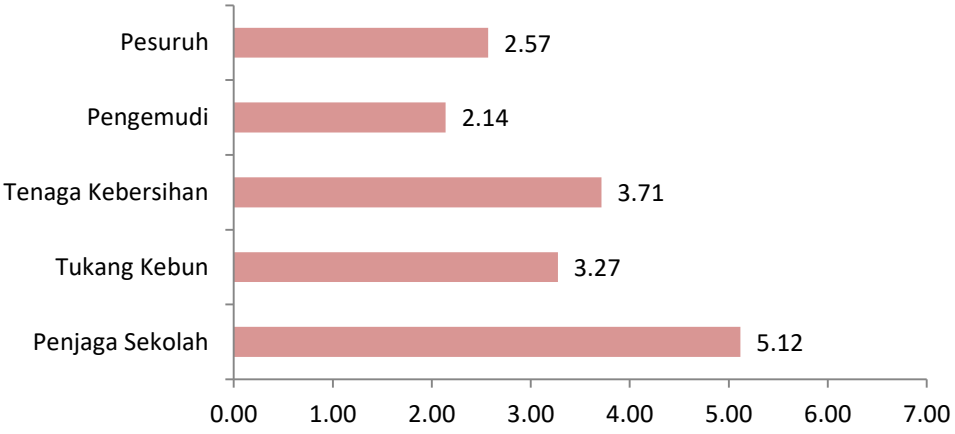

Grafik 3.49 Pemenuhan Indikator Tenaga Layanan Khusus

Pemenuhan indikator "tenaga layanan khusus" berdasarkan sub indikator setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada Grafik 3.50 berikut:

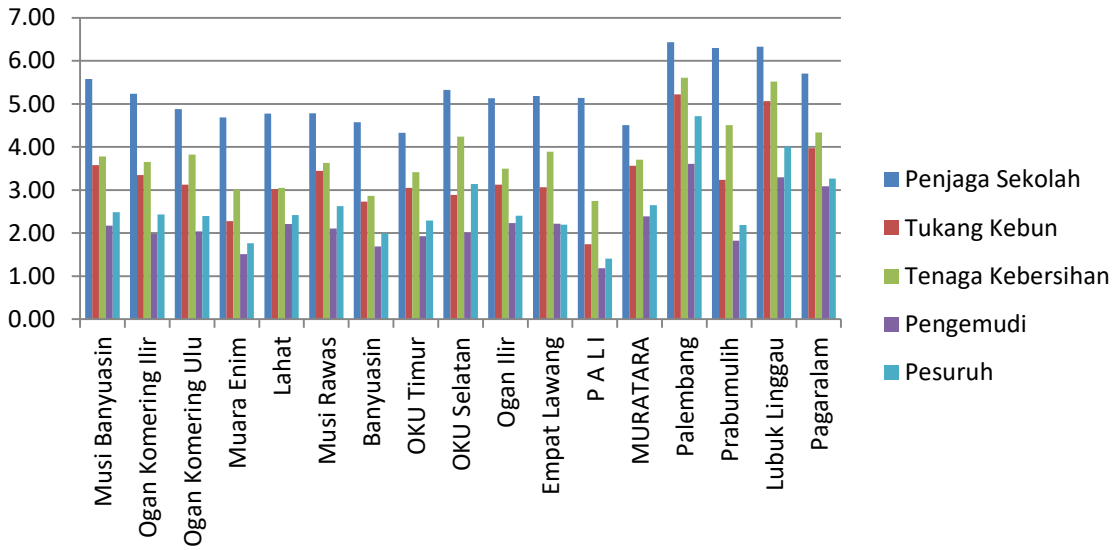

Grafik 3.50 Pemenuhan Indikator Tenaga Layanan Khusus Setiap Kabupaten/Kota

d. Pemenuhan Dimensi Tenaga Perpustakaan

Dari 2 indikator yang membentuk dimensi ke-4 (tenaga perpustakaan) diketahui bahwa indikator "tenaga perpustakaan" dan kepala perpustakaan" dengan skor pemenuhan masing-masing sebesar 4,76 dan 4,14.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemenuhan dimensi ke-4 (tenaga perpustakaan) dari standar pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai kategori Menuju SNP 3 dengan skor rerata 4,42. Secara grafis pemenuhan dimensi tenaga perpustakaan pada masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

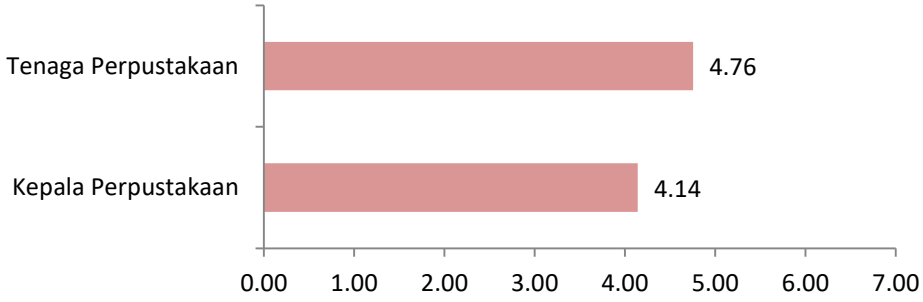

Grafik 3.51 Pemenuhan Dimensi Tenaga Perpustakaan

Pemenuhan dimensi "tenaga perpustakaan" berdasarkan indikator setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada Grafik 3.52 berikut:

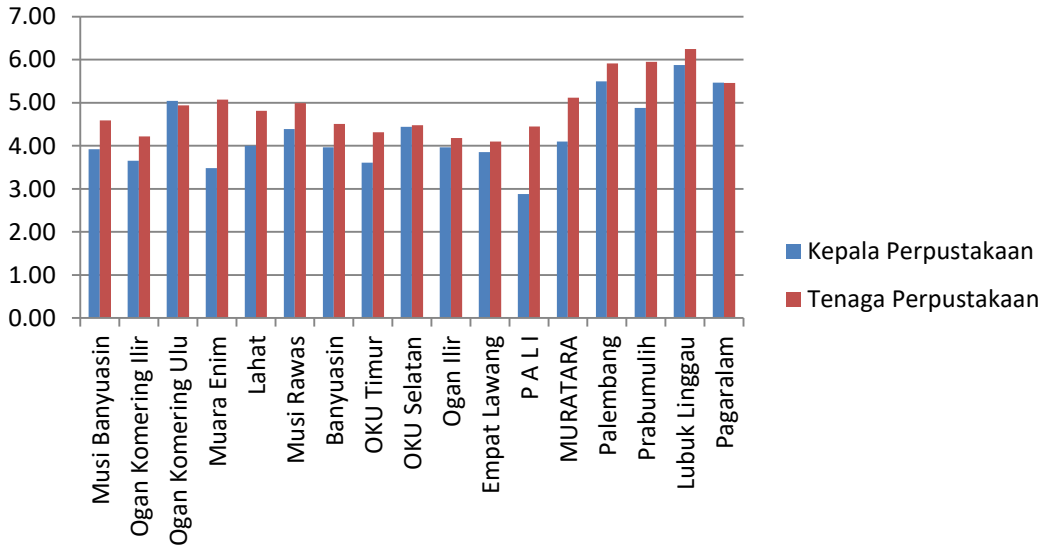

Grafik 3.52 Pemenuhan Dimensi Tenaga Perpustakaan Setiap Kabupaten/Kota

e. Pemenuhan Dimensi Tenaga Laboratorium

Dari 3 indikator yang membentuk dimensi ke-5 (tenaga laboratorium) diketahui bahwa indikator "kepala laboratorium" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 1,47, sedangkan indikator "laboran" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 1,40.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemenuhan dimensi ke-5 (tenaga laboratorium) dari standar pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai kategori Menuju SNP 1 dengan skor rerata 1,43. Secara grafis pemenuhan dimensi tenaga laboratorium pada masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

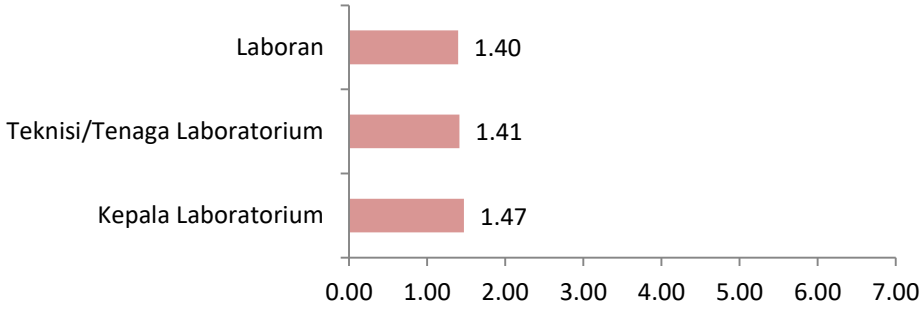

Grafik 3.53 Pemenuhan Dimensi Tenaga Laboratorium

Pemenuhan dimensi "tenaga laboratorium" berdasarkan indikator setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada Grafik 3.54 berikut:

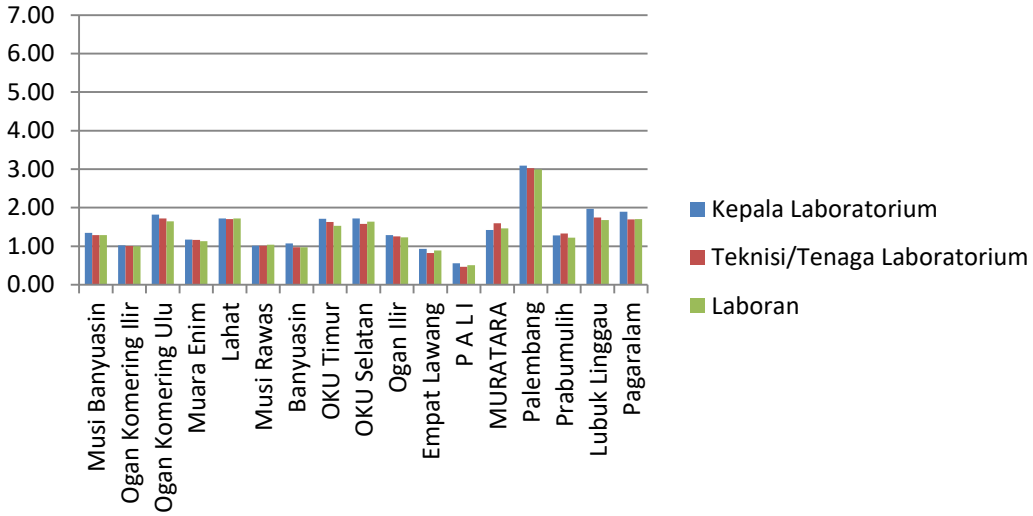

Grafik 3.54 Pemenuhan Dimensi Tenaga Laboratorium Setiap Kabupaten/Kota

6. Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana

Dari hasil analisis diketahui bahwa pemenuhan standar sarana dan prasarana satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan, secara umum baru mencapai kategori Menuju SNP 4 dengan skor rata-rata 5,54. Dari 4 dimensi yang membentuk standar sarana dan prasarana, diketahui bahwa dimensi ke-2 yakni "lahan" menjadi dimensi dengan skor pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 6,42, sedangkan dimensi ke-4 yakni dimensi "kelengkapan sarana dan prasarana" menjadi dimensi dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 4,23.

Secara grafis pemenuhan standar sarana dan prasarana pada masing-masing dimensi dapat dijelaskan sebagai berikut:

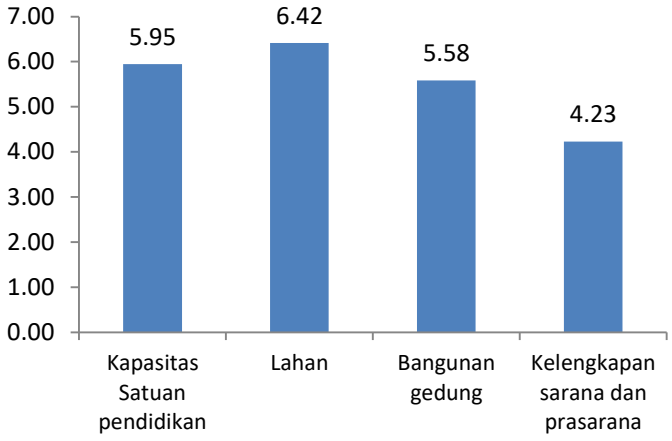

Grafik 3.55 Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana

Pemenuhan standar sarana dan prasarana berdasarkan dimensi setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada Grafik 3.56 berikut:

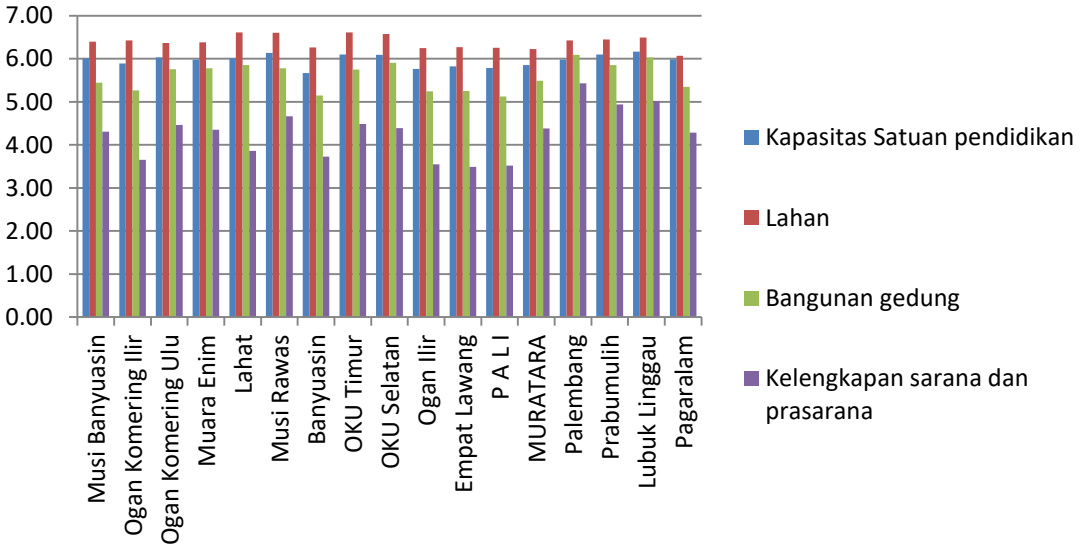

Grafik 3.56 Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Setiap Kabupaten/Kota

a. Pemenuhan Dimensi Kapasitas Satuan Pendidikan

Dari 3 indikator yang membentuk dimensi ke-1 (kapasitas satuan pendidikan) diketahui bahwa indikator "satuan pendidikan mampu melayani masyarakat minimal 2000 jiwa" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling tinggi sebesar 6,50, sedangkan indikator "jarak peserta didik ke sekolah maksimal 3 kilometer" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 4,99.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemenuhan dimensi ke-1 (kapasitas satuan pendidikan) dari standar sarana dan prasarana satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai kategori Menuju SNP 4 dengan skor rerata 5,95. Secara grafis pemenuhan dimensi kapasitas satuan pendidikan pada masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

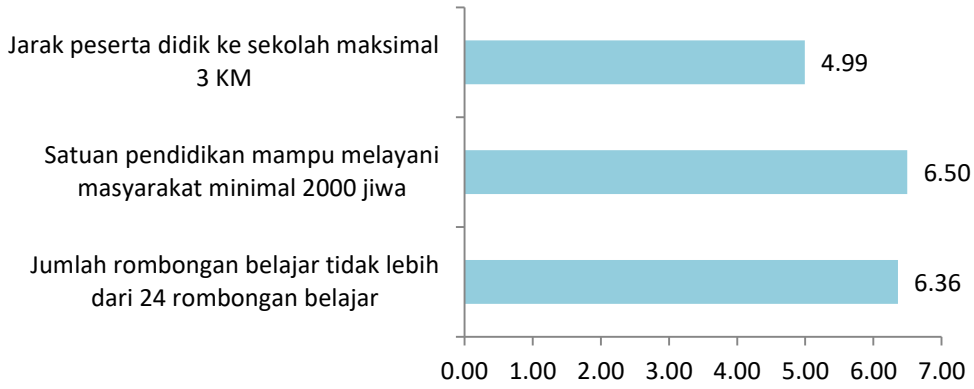

Grafik 3.57. Pemenuhan Dimensi Kapasitas Satuan Pendidikan

Pemenuhan dimensi "kapasistas satuan pendidikan" pada standar sarana dan prasarana berdasarkan indikator setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada Grafik 3.58 berikut:

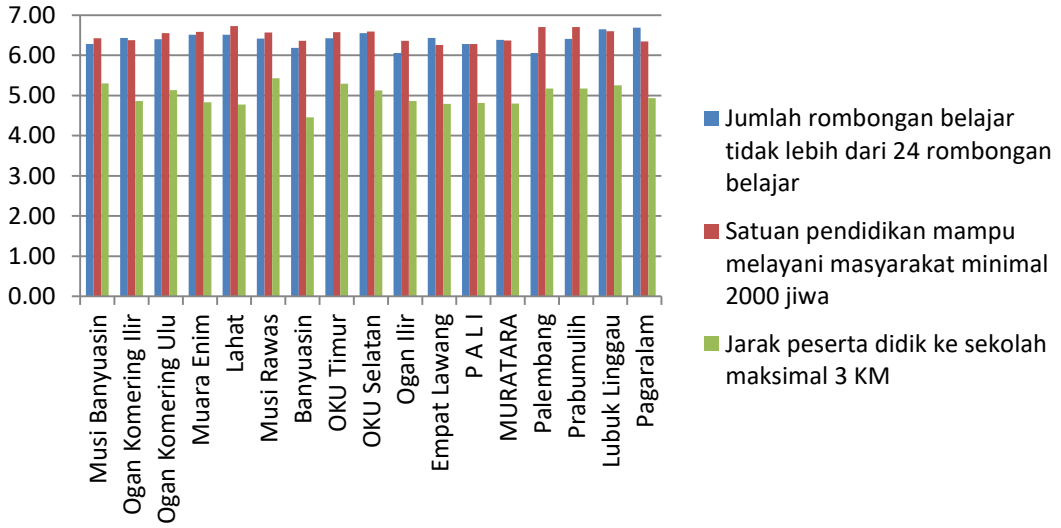

Grafik 3.58 Pemenuhan Dimensi Kapasitas Satuan Pendidikan Setiap Kabupaten/Kota

b. Pemenuhan Dimensi Lahan

Dari 4 indikator yang membentuk dimensi ke-2 (lahan) diketahui bahwa indikator "luas lahan minimum" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 6,47, sedangkan indikator "status hukum lahan" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 6,38.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemenuhan dimensi ke-2 (lahan) dari standar sarana dan prasarana satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai kategori Menuju SNP 4 dengan skor rerata 6,42. Secara grafis pemenuhan dimensi lahan pada masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

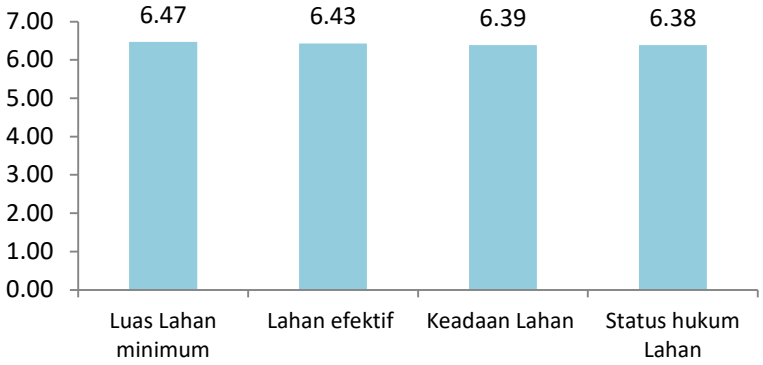

Grafik 3.59 Pemenuhan Dimensi Lahan

Pemenuhan dimensi "lahan" pada standar sarana dan prasarana berdasarkan indikator setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada Grafik 3.60 berikut:

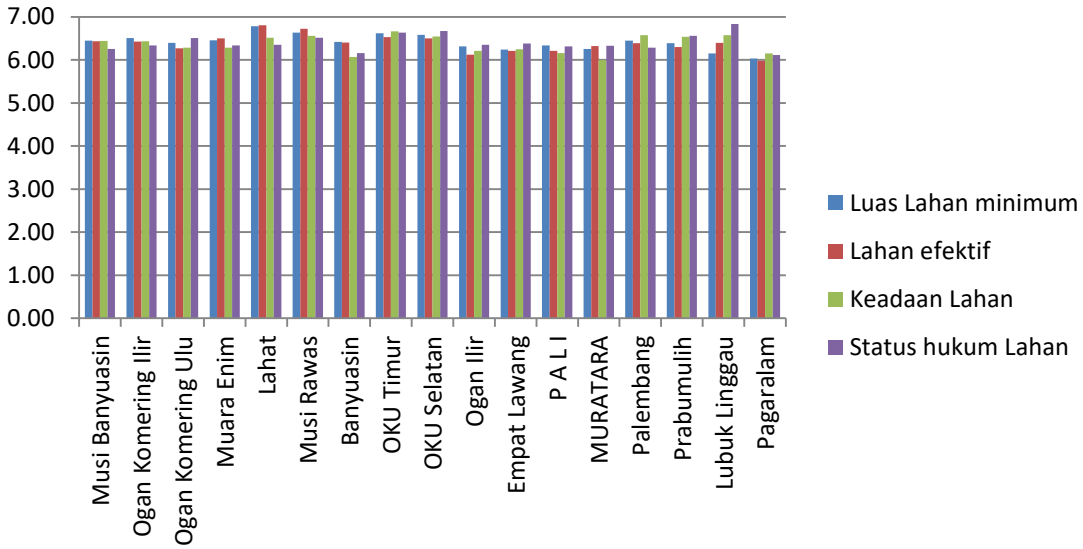

Grafik 3.60 Pemenuhan Dimensi Lahan Setiap Kabupaten/Kota

c. Pemenuhan Dimensi Bangunan Gedung

Dari 2 indikator yang membentuk dimensi ke-3 (bangunan gedung) diketahui bahwa indikator "luas bangunan" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 5,94, sedangkan indikator "keadaan bangunan" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 5,22.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemenuhan dimensi ke-3 (bangunan gedung) dari standar sarana dan prasarana satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai kategori Menuju SNP 4 dengan skor rerata 5,58. Secara grafis pemenuhan dimensi bangunan gedung pada masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

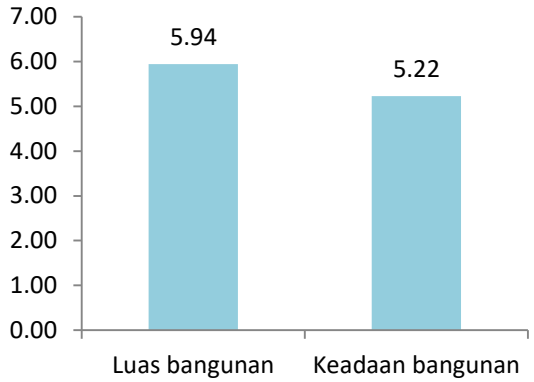

Grafik 3.61 Pemenuhan Dimensi Bangunan Gedung

Pemenuhan dimensi "bangunan gedung" pada standar sarana dan prasarana berdasarkan indikator setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada Grafik 3.62 berikut:

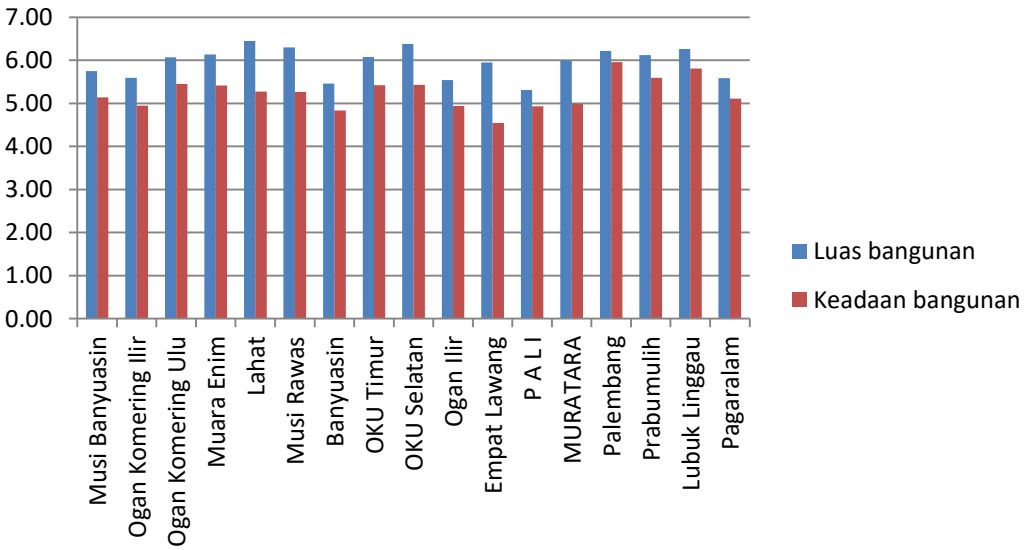

Grafik 3.62 Pemenuhan Dimensi Bangunan Gedung Setiap Kabupaten/Kota

d. Pemenuhan Dimensi Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Dari 2 indikator yang membentuk dimensi ke-4 (kelengkapan sarana dan prasarana) diketahui bahwa indikator "ruang penunjang" menjadi indikator dengan skor pemenuhan tertinggi yakni sebesar 4,30, sedangkan indikator "ruang pembelajaran umum" menjadi indikator dengan skor pemenuhan terendah yakni sebesar 4,16.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemenuhan dimensi ke-4 (kelengkapan sarana dan prasarana) dari standar sarana dan prasarana satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai kategori Menuju SNP 3 dengan skor rerata 4,23. Secara grafis pemenuhan dimensi kelengkapan sarana dan prasarana pada masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

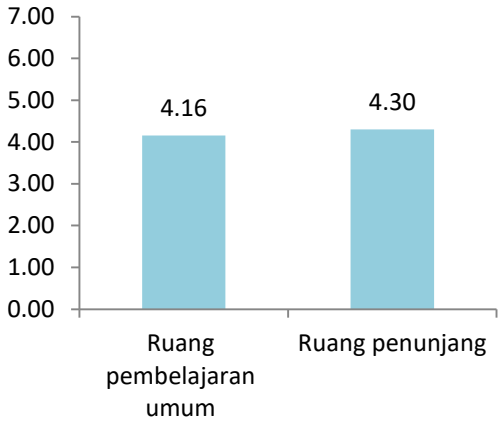

Grafik 3.63 Pemenuhan Dimensi Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Pemenuhan dimensi "kelengkapan sarana dan prasarana" pada standar sarana dan prasarana berdasarkan indikator setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada Grafik 3.64 berikut:

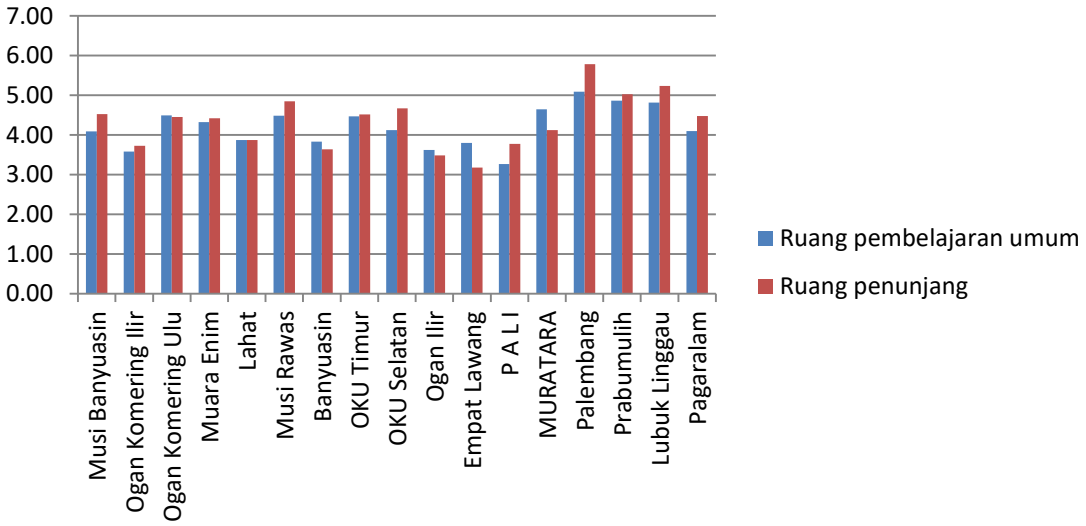

Grafik 3.64 Pemenuhan Dimensi Kelengkapan Sarana dan Prasarana Setiap Kabupaten/Kota

Terkait dengan indikator "ruang pembelajaran umum" dapat dilihat bahwa dari 9 sub indikator yang membentuk indikator "ruang pembelajaran umum" diketahui ketiga sub indikator tersebut masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), dimana sub indikator "ruang kelas" (6,22) baru mencapai kategori Menuju SNP 4, sedangkan sub indikator "ruang perpustakaan" (4,38) baru mencapai kategori Menuju SNP 3, dan sub indikator "laboratorium IPA" (1,88), baru memenuhi kategori menuju SNP 1 Secara grafis pemenuhan indikator ruang pembelajaran umum pada masing-masing sub indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

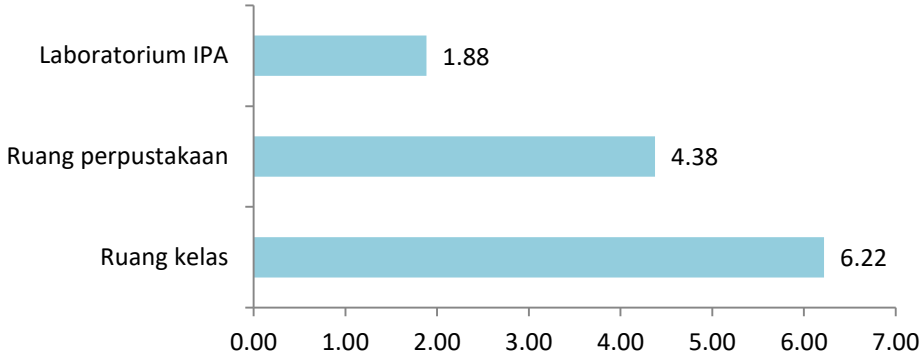

Grafik 3.65 Pemenuhan Indikator Kelengkapan Ruang Pembelajaran Umum

Pemenuhan indikator "kelengkapan ruang pembelajaran umum" berdasarkan sub indikator setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada Grafik 3.66 berikut:

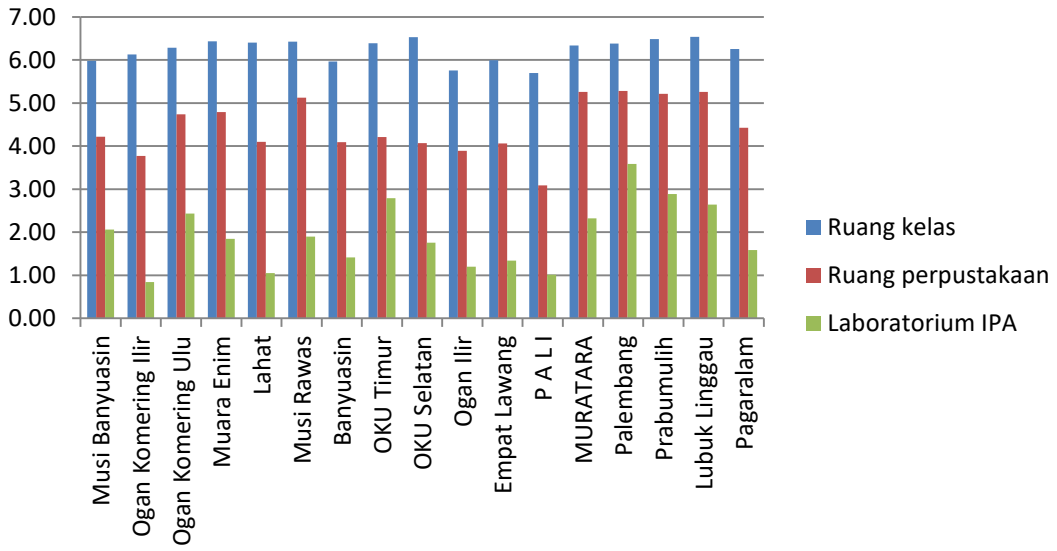

Grafik 3.66 Pemenuhan Indikator Kelengkapan Ruang Pembelajaran Umum Setiap Kabupaten/Kota

Demikian pula dengan indikator "ruang penunjang", dari grafik di bawah ini dapat dilihat bahwa dari 8 sub indikator yang membentuk indikator "ruang penunjang", diketahui ada 3 sub indikator yang baru mencapai kategori Menuju SNP 4 yaitu: sub indikator jamban (5,80),sub indikator tempat bermain/berolahraga (5,83), dan sub indikator ruang guru (5,23) sedangkan sub indikator ruang pimpinan (4,31),sub indikator ruang UKS (3,38) dan sub indikator gudang (3,88) baru memenuhi kategori Menuju SNP 3. Sedangkan sub indikator lainnya baru mencapai kategori Menuju SNP 2 yaitu: sub indikator tempat ibadah (2,83), dan sub indikator ruang sirkulasi (3,16). Secara grafis pemenuhan indikator "ruang penunjang" pada masing-masing sub indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

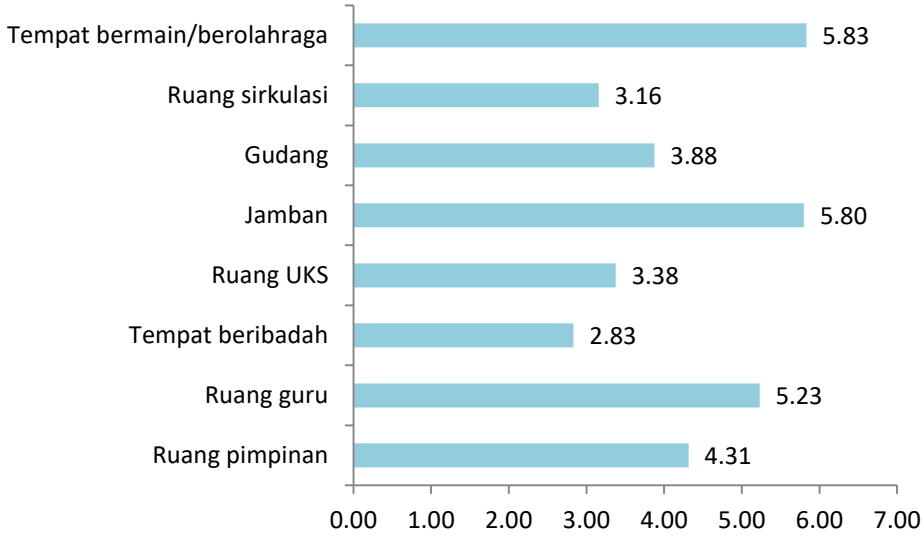

Grafik 3.67 Pemenuhan Indikator Kelengkapan Ruang Penunjang

Pemenuhan kelengkapan ruang penunjang berdasarkan sub indikator setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada Grafik 3.68 berikut:

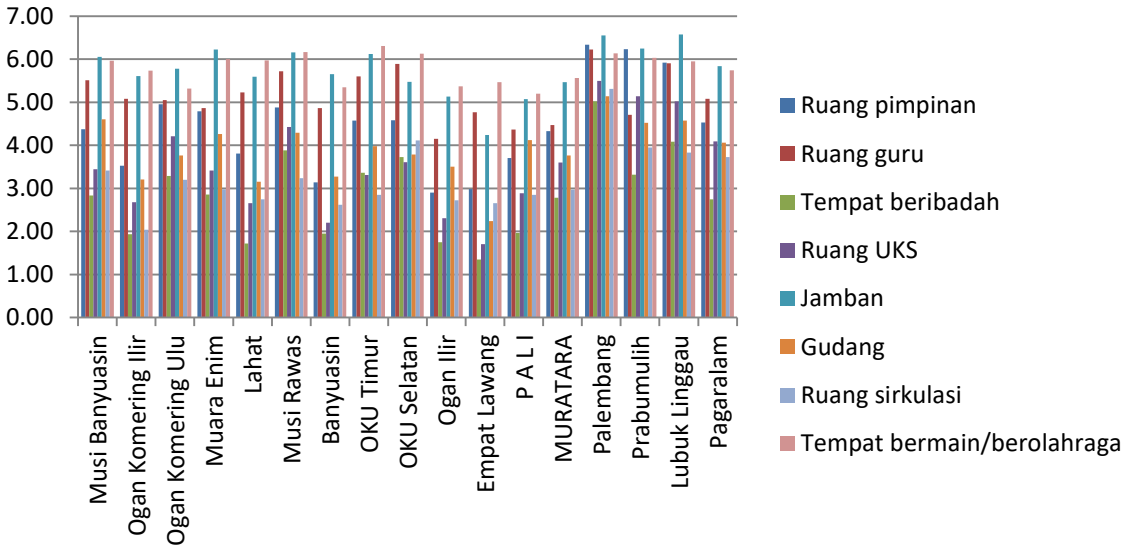

Grafik 3.68 Pemenuhan Indikator Kelengkapan Ruang Penunjang Setiap Kabupaten/Kota

7. Pemenuhan Standar Pengelolaan

Dari hasil analisis diketahui bahwa Pemenuhan standar pengelolaan satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan, secara umum baru mencapai kategori Menuju SNP 4 dengan skor 6,02. Dari 5 dimensi yang membentuk standar pengelolaan, diketahui bahwa dimensi ke-1 yakni "perencanaan program" menjadi dimensi dengan skor pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 6,53, sedangkan dimensi ke-4 yakni dimensi "kepemimpinan sekolah" menjadi dimensi dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 5,79.

Secara grafis pemenuhan standar pengelolaan pada masing-masing dimensi dapat dijelaskan sebagai berikut:

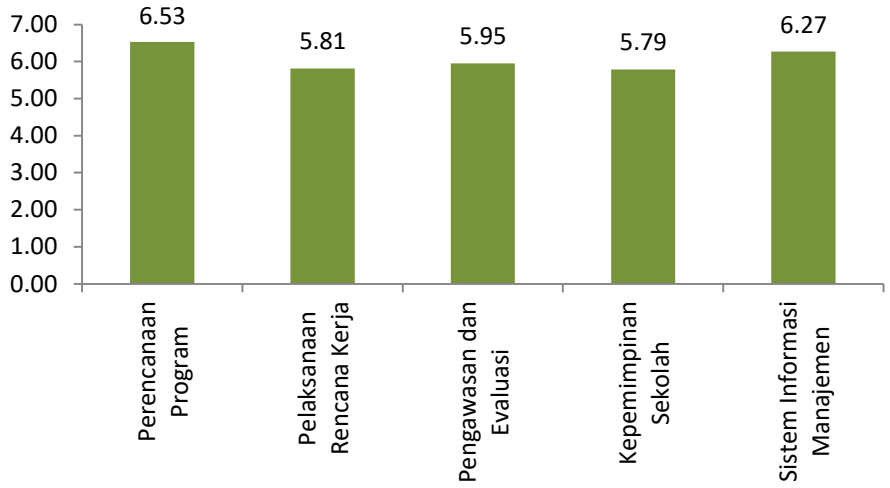

Grafik 3.69 Pemenuhan Standar Pengelolaan

Pemenuhan standar pengelolaan berdasarkan dimensi setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada Grafik 3.70 berikut:

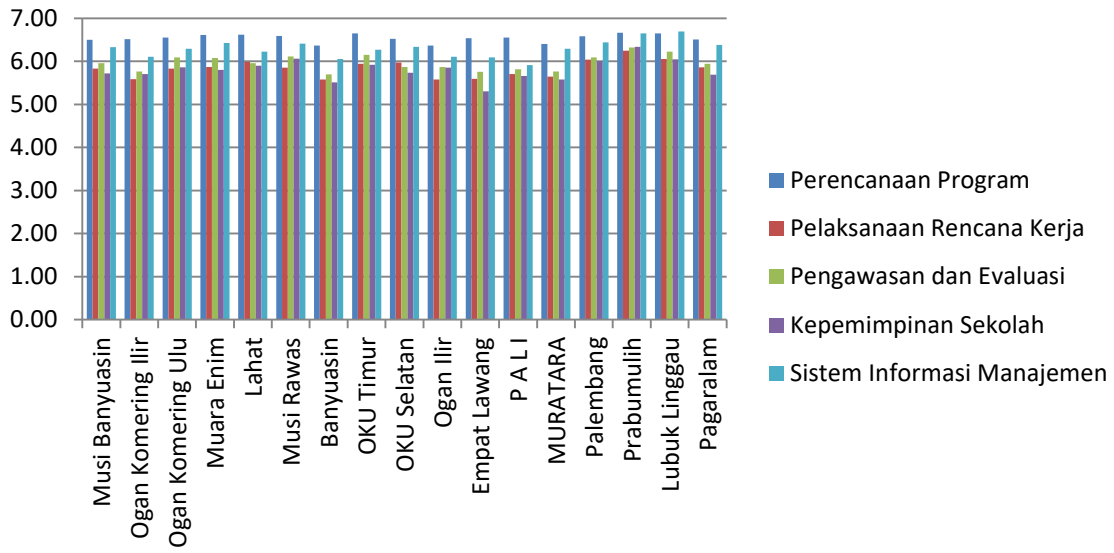

Grafik 3.70 Pemenuhan Standar Pengelolaan Setiap Kabupaten/Kota

a. Pemenuhan Dimensi Perencanaan Program

Dari 4 indikator yang membentuk dimensi ke-1 (perencanaan program) diketahui bahwa indikator "ketersediaan dokumen rencana kerja tahunan yang dimiliki sekolah" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 6,89, sedangkan indikator "dasar penyusunan rencana kerja sekolah" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 5,98.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemenuhan dimensi ke-1 (perencanaan program) dari standar pengelolaan satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai kategori Menuju SNP 4

dengan skor rerata 6,53. Secara grafis pemenuhan dimensi perencanaan program pada masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

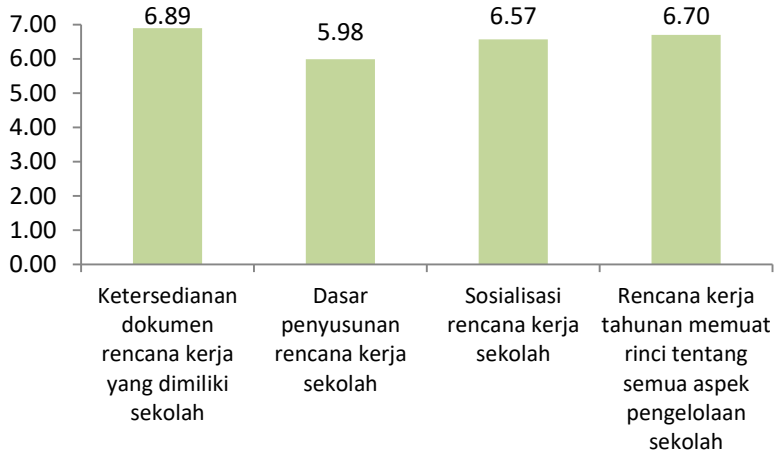

Grafik 3.71 Pemenuhan Dimensi Perencanaan Program

Pemenuhan dimensi "perencanaan program" berdasarkan indikator setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada Grafik 3.72 berikut:

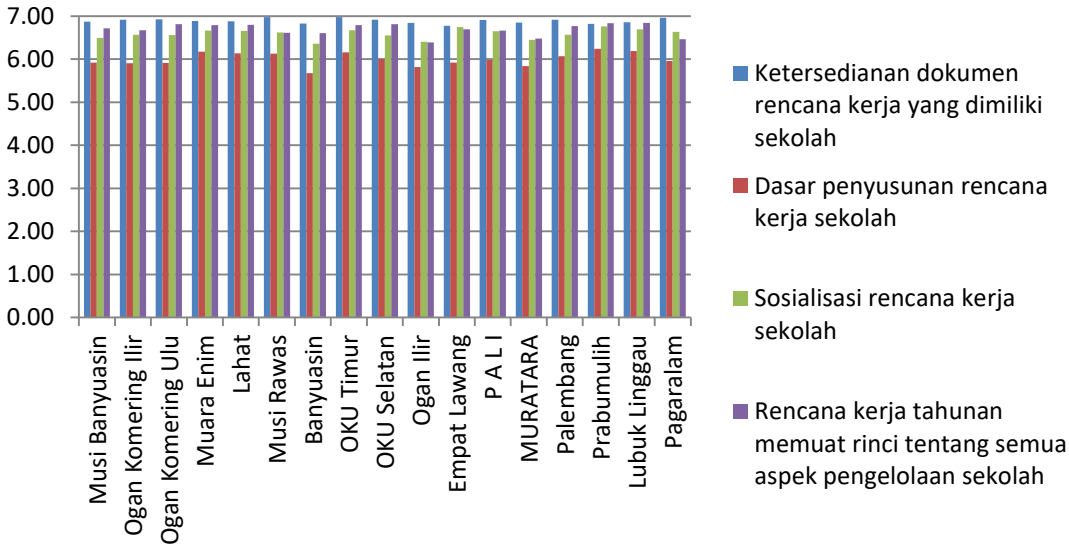

Grafik 3.72 Pemenuhan Dimensi Perencanaan Program Setiap Kabupaten/Kota

b. Pemenuhan Dimensi Pelaksanaan Rencana Kerja

Dari 10 indikator yang membentuk dimensi ke-3 (pelaksanaan rencana kerja) diketahui bahwa indikator "bidang keuangan dan pembiayaan" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 6,46, sedangkan indikator "peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 4,46.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemenuhan dimensi ke-2 (pelaksanaan rencana kerja) dari standar pengelolaan satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai kategori Menuju SNP

4 dengan skor rerata 5,81. Secara grafis pemenuhan dimensi pelaksanaan rencana kerja pada masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

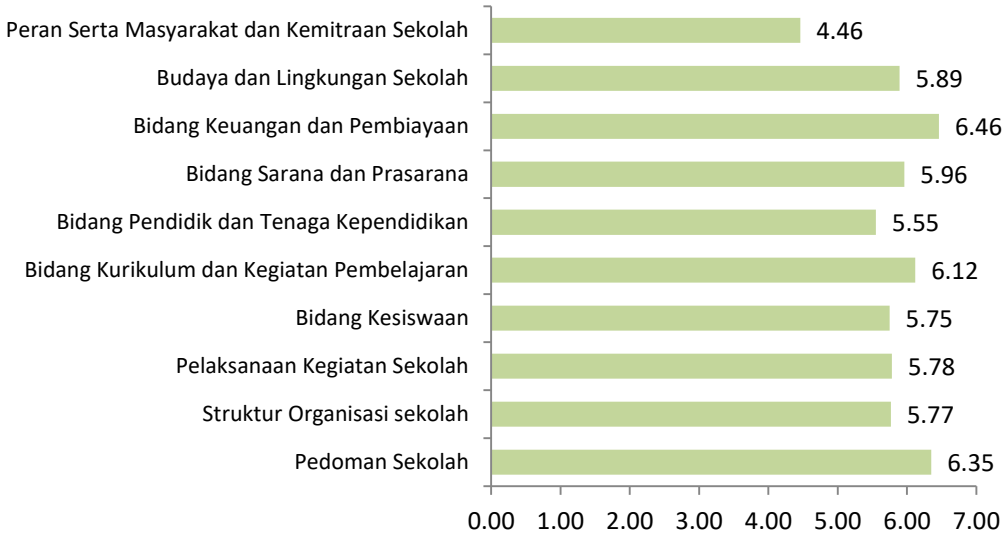

Grafik 3.73 Pemenuhan Dimensi Pelaksanaan Rencana Kerja

Pemenuhan dimensi "pelaksanaan rencana kerja" berdasarkan indikator setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada Grafik 3.74 berikut:

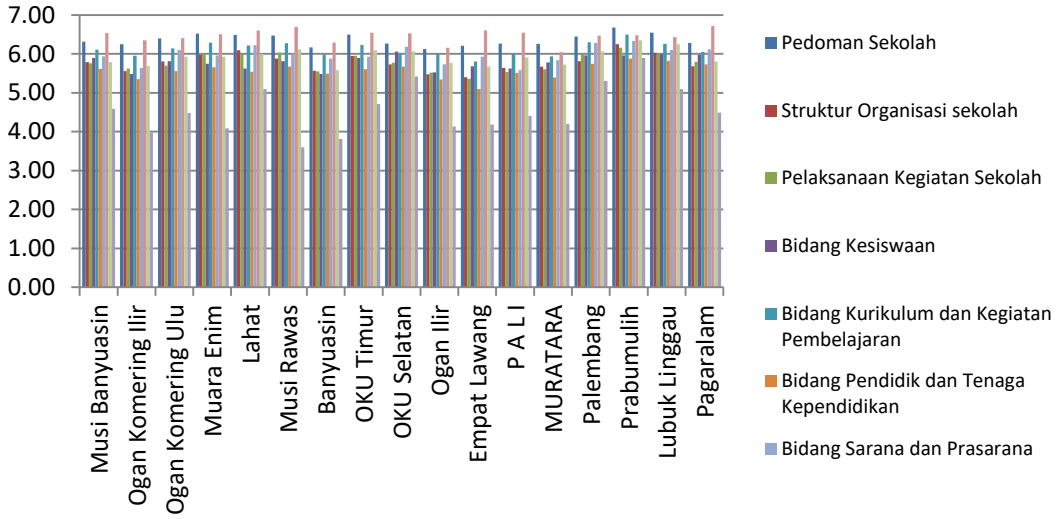

Grafik 3.74 Pemenuhan Dimensi Pelaksanaan Rencana Kerja Setiap Kabupaten/Kota

c. Pemenuhan Dimensi Pengawasan dan Evaluasi

Dari 4 indikator yang membentuk dimensi ke-3 (pengawasan dan evaluasi) diketahui bahwa indikator "akreditasi sekolah" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 6,43, sedangkan indikator "evaluasi diri" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 5,58.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemenuhan dimensi ke-3 (pengawasan dan evaluasi) dari standar pengelolaan satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai kategori Menuju SNP 4 dengan skor rerata 5,95. Secara grafis pemenuhan dimensi pelaksanaan rencana kerja pada masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

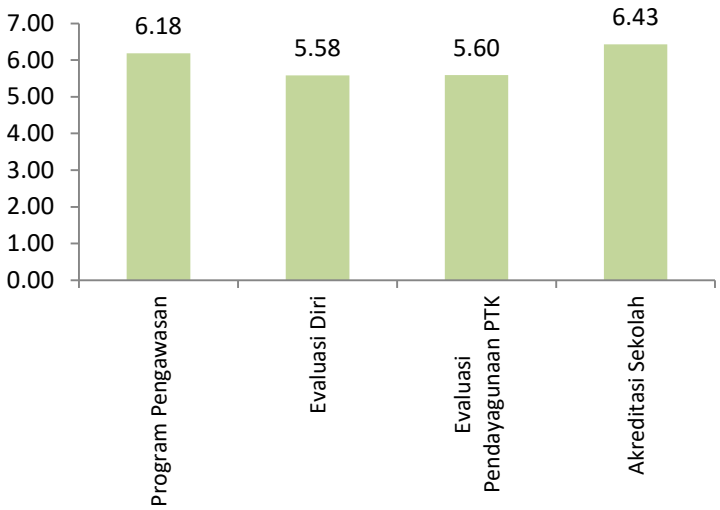

Grafik 3.75 Pemenuhan Dimensi Pengawasan dan Evaluasi

Pemenuhan dimensi "pengawasan dan evaluasi" berdasarkan indikator setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada Grafik 3.76 berikut:

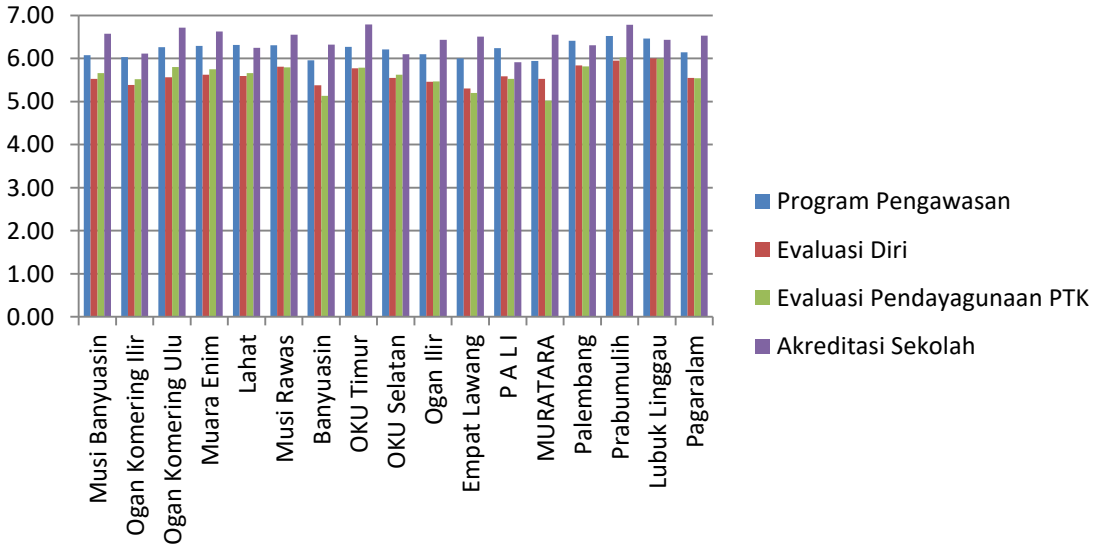

Grafik 3.76 Pemenuhan Dimensi Pengawasan dan Evaluasi Setiap Kabupaten/Kota

d. Pemenuhan Dimensi Kepemimpinan Sekolah

Dari 2 indikator yang membentuk dimensi ke-4 (kepemimpinan sekolah) diketahui bahwa indikator "keteladanan kepala sekolah" menjadi indikator dengan skor pemenuhan tertinggi yakni sebesar 5,90, sedangkan indikator "kemampuan

kepala sekolah" menjadi indikator dengan skor pemenuhan terendah yakni sebesar 5,68.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemenuhan dimensi ke-4 (kepemimpinan sekolah) dari standar pengelolaan satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai kategori Menuju SNP 4 dengan skor rerata 5,79. Secara grafis pemenuhan dimensi kepemimpinan kepala sekolah pada masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

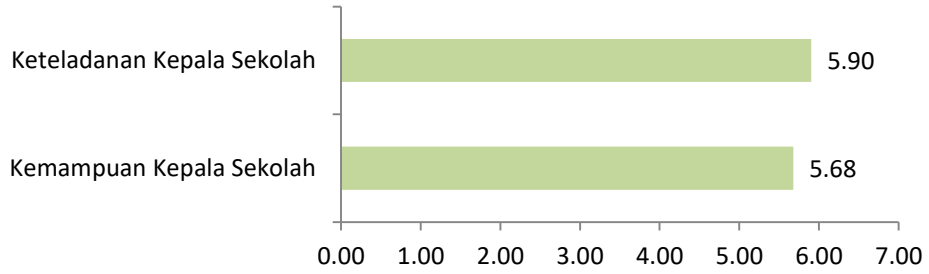

Grafik 3.77 Pemenuhan Dimensi Kepemimpinan Sekolah

Pemenuhan dimensi "kepemimpinan kepala sekolah" berdasarkan indikator setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada Grafik 3.78 berikut:

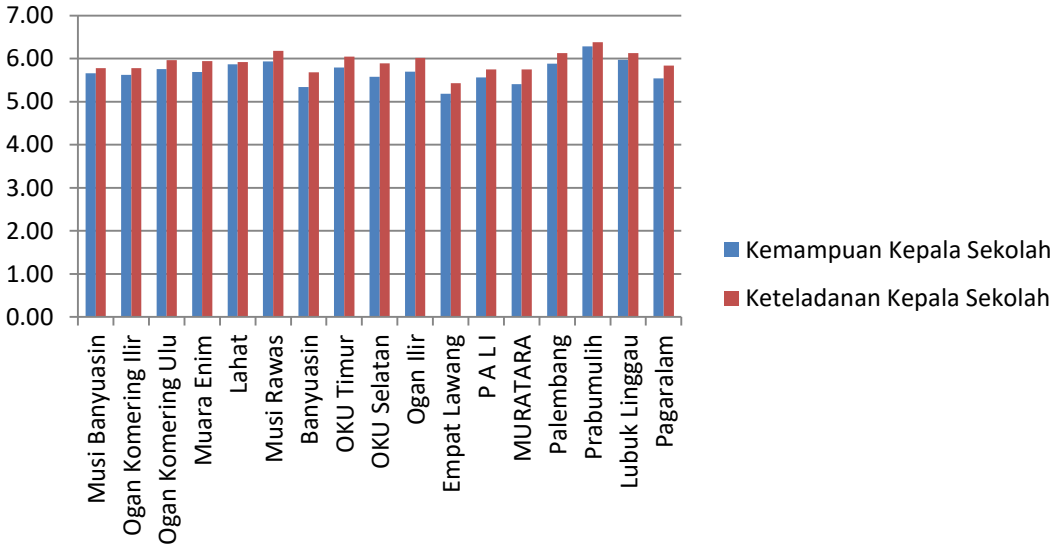

Grafik 3.78 Pemenuhan Kepemimpinan Sekolah Setiap Kabupaten/Kota

e. Pemenuhan Dimensi Sistem Informasi Manajemen

Dari 1 indikator yang membentuk dimensi ke-5 (sistem informasi manajemen) diketahui bahwa indikator "sistem informasi manajemen" memiliki skor pemenuhan sebesar 6,27. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan dimensi ke-5 (sistem informasi manajemen) dari standar pengelolaan satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai kategori Menuju SNP 4 dengan skor rerata 6,27. Secara grafis pemenuhan dimensi sistem informasi manajemen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

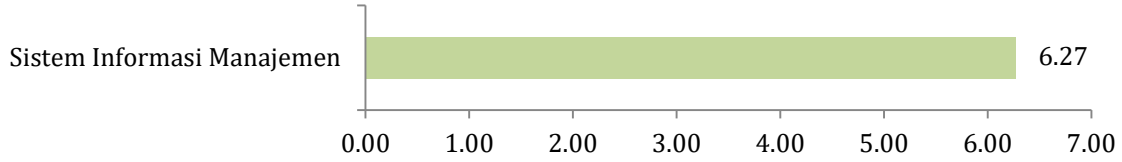

Grafik 3.79 Pemenuhan Dimensi Sistem Informasi Manajemen

Pemenuhan sistem informasi manajemen berdasarkan indikator setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada Grafik 3.80 berikut:

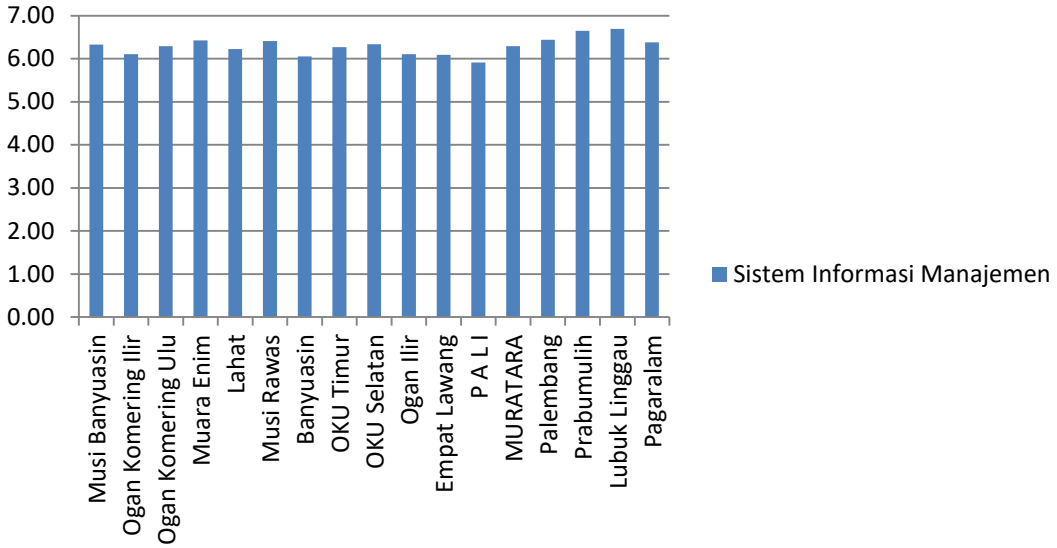

Grafik 3.80 Pemenuhan Dimensi Sistem Informasi Manajemen Setiap Kabupaten/Kota

8. Pemenuhan Standar Pembiayaan

Dari hasil analisis diketahui bahwa ke-3 dimensi yang membentuk standar pembiayaan, diketahui bahwa dimensi ke-3 yakni "sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik" menjadi dimensi dengan skor pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 6,34, sedangkan dimensi ke-1 yakni dimensi "sekolah memberikan layanan subsidi silang" menjadi dimensi dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 5,74.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemenuhan standar pembiayaan satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai kategori Menuju SNP 4 dengan skor rerata 6,13. Secara grafis pemenuhan standar pengelolaan pada masing-masing dimensi dapat dijelaskan sebagai berikut:

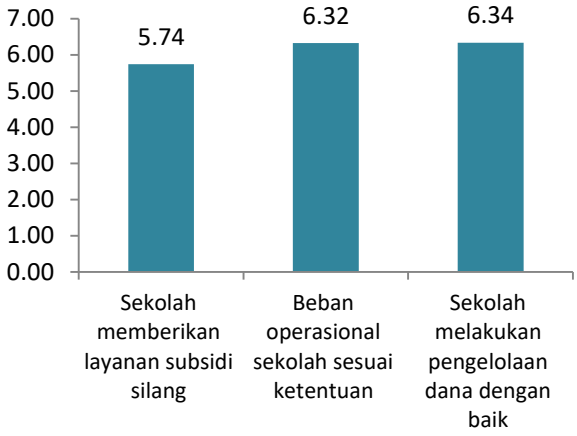

Grafik 3.81 Pemenuhan Standar Pembiayaan

Pemenuhan standar pembiayaan berdasarkan dimensi setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada Grafik 3.82 berikut:

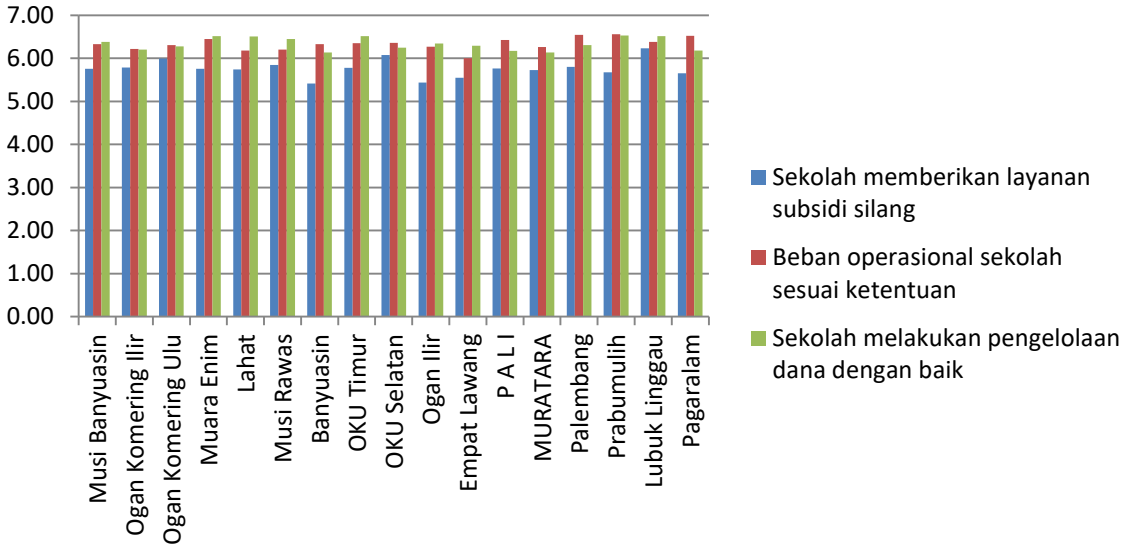

Grafik 3.82 Pemenuhan Standar Pembiayaan Setiap Kabupaten/Kota

a. Pemenuhan Dimensi Sekolah Memberikan Layanan Subsidi Silang

Dari 3 indikator yang membentuk dimensi ke-1 (sekolah memberikan layanan subsidi silang) diketahui bahwa indikator "pembebasan biaya bagi siswa tidak mampu" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 6,49, sedangkan indikator "melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 4,59.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemenuhan dimensi ke-1 (sekolah memberikan layanan subsidi silang) dari standar pembiayaan satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai kategori Menuju SNP 4 dengan skor rerata 5,74. Secara grafis pemenuhan dimensi sekolah memberikan layanan subsidi silang pada masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

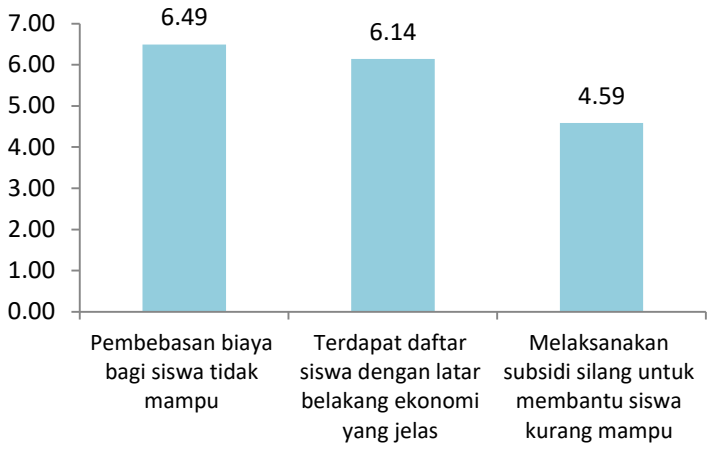

Grafik 3.83 Pemenuhan Dimensi Sekolah Memberikan Layanan Subsidi Silang

Pemenuhan dimensi "sekolah memberikan layanan subsidi silang" berdasarkan indikator setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada Grafik 3.84 berikut:

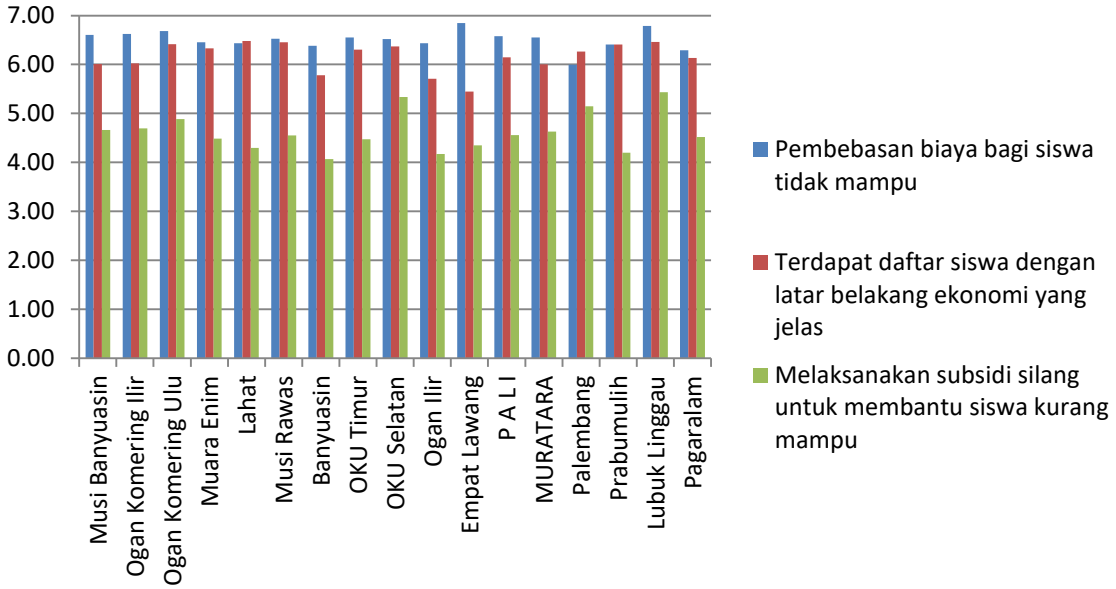

Grafik 3.84 Pemenuhan Dimensi Sekolah Memberikan Layanan Subsidi Silang Setiap Kabupaten/Kota

b. Pemenuhan Dimensi Beban Operasional Sekolah Sesuai Ketentuan

Indikator yang membentuk dimensi ke-2 (beban operasional sekolah sesuai ketentuan) diketahui bahwa indikator "terdapat biaya operasional non personil sesuai ketentuan" dengan skor pemenuhan sebesar 6,32, baru mencapai kategori Menuju SNP 4 Secara grafis pemenuhan dimensi beban operasional sekolah sesuai ketentuan dapat dilihat sebagai berikut:

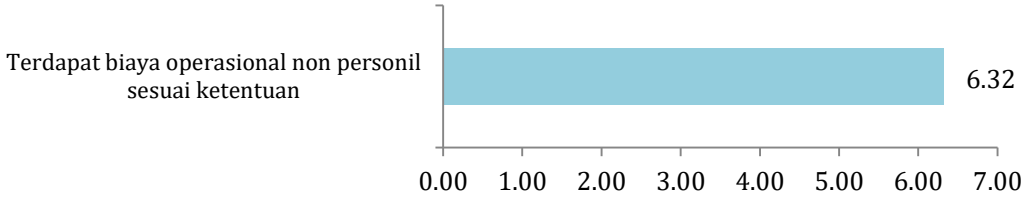

Grafik 3.85 Pemenuhan Dimensi Beban Operasional Sekolah

Pemenuhan dimensi "beban operasional sekolah" berdasarkan indikator setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada Grafik 3.86 berikut:

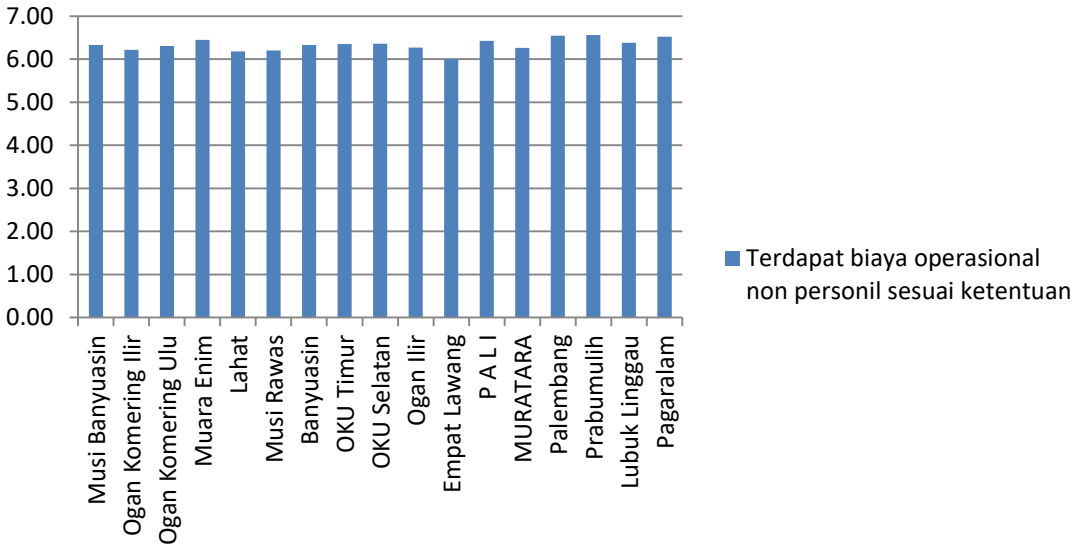

Grafik 3.86 Pemenuhan Dimensi Beban Operasional Sekolah Setiap Kabupaten/Kota

c. Pemenuhan Dimensi Sekolah Melakukan Pengelolaan Dana dengan Baik

Dari 3 indikator yang membentuk dimensi ke-3 (sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik) diketahui bahwa indikator "pengaturan alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/Sumber lainnya" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling tinggi yakni sebesar 6,57, sedangkan indikator "terdapat laporan pengelolaan dana" menjadi indikator dengan skor pemenuhan paling rendah yakni sebesar 6,18.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemenuhan dimensi ke-3 (sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik) dari standar pembiayaan satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai kategori Menuju SNP 4 dengan skor rerata 6,34. Secara grafis pemenuhan dimensi sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik pada masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

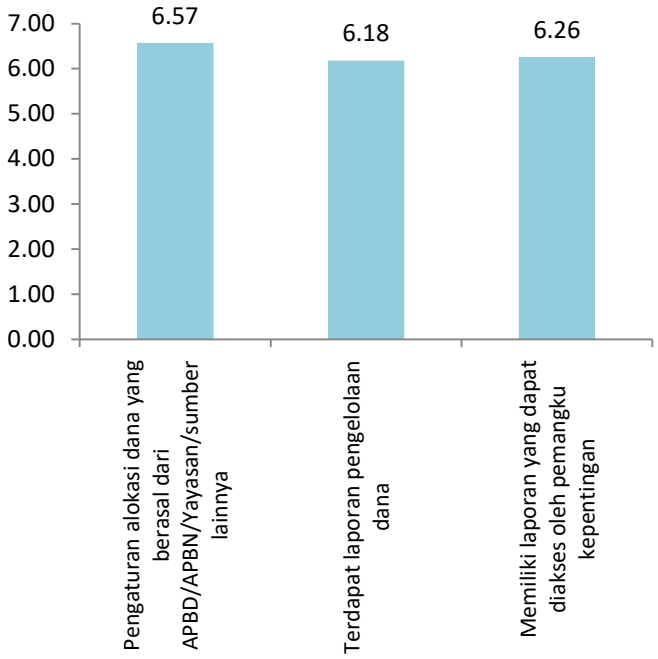

Grafik 3.87 Pemenuhan Dimensi Sekolah Melakukan Pengelolaan Dana Dengan Baik

Pemenuhan dimensi "sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik" berdasarkan indikator setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada Grafik 3.88 berikut:

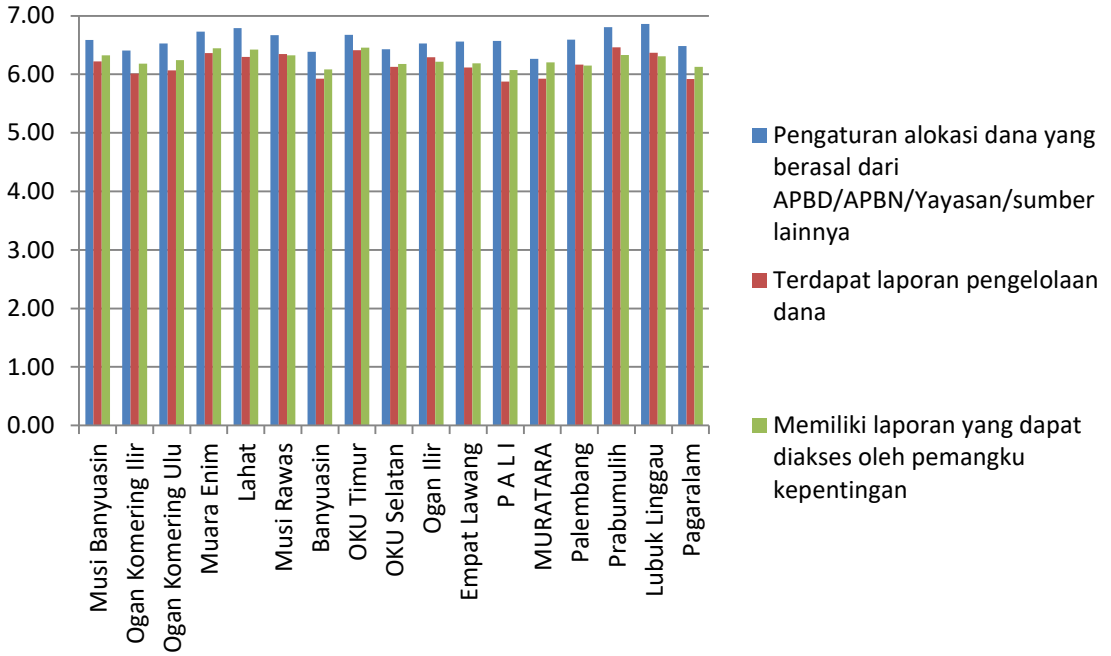

Grafik 3.88 Pemenuhan Dimensi Sekolah Melakukan Pengelolaan Dana Dengan Baik Setiap Kabupaten/Kota

BAB IV
KESIMPULAN, IMPLIKASI MANAJERIAL, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi data mutu pendidikan pada bab terdahulu, maka dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan satuan pendidikan SD di Provinsi Sumatera Selatan sebagian besar baru memenuhi kategori IV atau Menuju SNP 4 yakni sebesar 88,99%, yang telah memenuhi kategori V atau telah memenuhi SNP sebesar 1,79%. Selebihnya 8,91% baru memenuhi kategori III atau Menuju SNP 3, dan 0,30% baru memenuhi kategori II atau Menuju SNP 2.
2. Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan masih berada di bawah SNP. Hal itu diketahui dari nilai rerata capaian SKL sebesar 5,57 yang berarti baru mencapai kategori Menuju SNP 4. Dari 3 dimensi yang membentuk SKL, diketahui terdapat 1 dimensi yang masuk dalam kategori Menuju SNP 3 yakni dimensi "lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan" dengan nilai rerata pemenuhan sebesar 4,55, sedangkan 2 dimensi lainnya masuk dalam kategori Menuju SNP 4, yaitu: dimensi "lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap" dengan nilai rerata pemenuhan 5,94 dan dimensi "lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan" dengan nilai rerata pemenuhan 6,22.
3. Pemenuhan Standar Isi satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan masih berada di bawah SNP. Hal itu diketahui dari nilai rerata capaian Standar Isi sebesar 6,09 yang berarti baru mencapai kategori Menuju SNP 4. Dari 3 dimensi yang membentuk Standar Isi, diketahui ke-3 dimensi baru memenuhi kategori Menuju SNP 4 yakni dimensi "muatan kurikulum" dengan nilai rerata pemenuhan 6,34, dimensi "rancangan mata pelajaran dan beban belajar" dengan nilai rerata pemenuhan 6,63, dan dimensi "kurikulum" dengan nilai rerata pemenuhan sebesar 5,30.
4. Pemenuhan Standar Proses satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan masih berada di bawah SNP. Hal itu diketahui dari nilai rerata capaian Standar Proses sebesar 5,96 yang berarti baru mencapai kategori Menuju SNP 4. Dari 3 dimensi yang membentuk Standar Proses, diketahui semua dimensi tersebut masuk dalam kategori Menuju SNP 4, yakni: dimensi "perencanaan pembelajaran" dengan nilai rerata pemenuhan sebesar 6,34, dimensi "pelaksanaan pembelajaran dan penilaian" dengan nilai rerata pemenuhan 5,89, dan dimensi "pengawasan proses pembelajaran" dengan nilai rerata pemenuhan 5,66.
5. Pemenuhan Standar Penilaian Pendidikan satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan masih berada di bawah SNP. Hal itu diketahui dari nilai rerata capaian Standar Penilaian Pendidikan sebesar 5,84 yang berarti baru mencapai kategori Menuju SNP 4. Dari 7 dimensi yang membentuk Standar Penilaian Pendidikan, diketahui semua dimensi tersebut masuk dalam kategori Menuju SNP 4, yakni: dimensi "lingkup penilaian pendidikan" dengan nilai rerata pemenuhan sebesar 5,82, dimensi "tujuan penilaian pendidikan" dengan nilai rerata pemenuhan 5,79, dimensi "manfaat penilaian pendidikan" dengan nilai

rerata pemenuhan 5,28, dimensi "prinsip penilaian pendidikan" dengan nilai rerata pemenuhan 6,57, dimensi "mekanisme penilaian pendidikan" dengan nilai rerata pemenuhan 5,92, dimensi "prosedur penilaian pendidikan" dengan nilai rerata pemenuhan 5,90, dan dimensi "instrumen penilaian pendidikan" dengan nilai rerata pemenuhan 5,63.

6. Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan masih berada di bawah SNP. Hal itu diketahui dari nilai rerata capaian Standar PTK sebesar 5,02 yang berarti baru mencapai kategori Menuju SNP 3. Dari 5 dimensi yang membentuk Standar PTK, diketahui terdapat 1 dimensi yang masuk dalam kategori Menuju SNP 1 yakni dimensi "tenaga laboratorium" dengan nilai rerata pemenuhan sebesar 1,43, 1 dimensi masuk dalam kategori Menuju SNP 3, yaitu: dimensi "tenaga perpustakaan" dengan nilai rerata pemenuhan 4,42, dan 3 dimensi lainnya masuk dalam kategori Menuju SNP 4, yaitu: dimensi "pendidik/guru" dengan nilai rerata pemenuhan 5,06, dimensi "tenaga administrasi sekolah" dengan nilai rerata pemenuhan 5,31, dan dimensi "kepala sekolah" dengan nilai rerata pemenuhan 5,75.
7. Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan masih berada di bawah SNP. Hal itu diketahui dari nilai rerata capaian Standar Sarpras sebesar 5,54 yang berarti baru mencapai kategori Menuju SNP 4. Dari 4 dimensi yang membentuk Standar Sarana dan Prasarana, diketahui terdapat 1 dimensi yang masuk dalam kategori Menuju SNP 3, yakni dimensi "kelengkapan sarana dan prasarana" dengan nilai rerata pemenuhan sebesar 4,23, dan 3 dimensi masuk dalam kategori Menuju SNP 4, yaitu: dimensi "kapasitas satuan pendidikan" dengan nilai rerata pemenuhan 5,95, dimensi "lahan" dengan nilai rerata pemenuhan 6,42, dan dimensi "bangunan gedung" dengan nilai rerata pemenuhan 5,58.
8. Pemenuhan Standar Pengelolaan satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan masih berada di bawah SNP. Hal itu diketahui dari nilai rerata capaian Standar Pengelolaan sebesar 6,02 yang berarti baru mencapai kategori Menuju SNP 4. Dari 5 dimensi yang membentuk Standar Pengelolaan, diketahui semua dimensi tersebut masuk dalam kategori Menuju SNP 4, yakni: dimensi "perencanaan program" dengan nilai rerata pemenuhan sebesar 6,53, dimensi "pelaksanaan rencana kerja" dengan nilai rerata pemenuhan 5,81, dimensi "pengawasan dan evaluasi" dengan nilai rerata pemenuhan 5,95, dimensi "kepemimpinan kepala sekolah" dengan nilai rerata pemenuhan 5,79, dan dimensi "sistem informasi manajemen" dengan nilai rerata pemenuhan 6,27.
9. Pemenuhan Standar Pembiayaan satuan pendidikan SD Provinsi Sumatera Selatan masih berada di bawah SNP. Hal itu diketahui dari nilai rerata capaian Standar pembiayaan sebesar 6,13 yang berarti baru mencapai kategori Menuju SNP 4. Dari 3 dimensi yang membentuk Standar Pembiayaan, diketahui semua dimensi tersebut masuk dalam kategori Menuju SNP 4, yakni: dimensi "sekolah memberi layanan subsidi silang" dengan nilai rerata pemenuhan sebesar 5,74, dimensi "beban operasional sekolah sesuai ketentuan" dengan nilai rerata pemenuhan 6,32, dan dimensi "sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik" dengan nilai rerata pemenuhan 6,34.

B. Implikasi Manajerial

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan implikasi manajerial sebagai berikut:

1. Bahwa untuk meningkatkan ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan satuan pendidikan Sekolah Dasar Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu diprioritaskan pada peningkatan dimensi "lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan" yang direfleksikan melalui 4 indikator berikut yaitu: faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif.
2. Bahwa untuk meningkatkan ketercapaian Standar Isi satuan pendidikan Sekolah Dasar Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu diprioritaskan pada peningkatan dimensi "kurikulum" yang direfleksikan melalui indikator "perangkat pengembangan KTSP", "sosialisasi perangkat kurikulum" dan "sekolah melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan KTSP".
3. Bahwa untuk meningkatkan ketercapaian Standar Proses satuan pendidikan Sekolah Dasar Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu diprioritaskan pada peningkatan dimensi "pengawasan proses pembelajaran" yang direfleksikan melalui indikator "prinsip pengawasan", sistem dan entitas pengawasan" dan "proses pengawasan".
4. Bahwa untuk meningkatkan ketercapaian Standar Penilaian Pendidikan satuan pendidikan Sekolah Dasar Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu diprioritaskan pada peningkatan dimensi "manfaat penilaian pendidikan" yang direfleksikan melalui indikator "manfaat penilaian hasil belajar oleh pendidik", manfaat hasil belajar oleh satuan pendidikan" dan "manfaat penilaian hasil belajar oleh pemerintah".
5. Bahwa untuk meningkatkan ketercapaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan pendidikan Sekolah Dasar Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu diprioritaskan pada peningkatan:
   a. dimensi "kepala sekolah" yang direfleksikan melalui 2 indikator berikut yaitu: "kompetensi kepala sekolah" dan "kualifikasi kepala sekolah (kualifikasi sertifikasi sebagai guru, dan sertifikasi sebagai kepala sekolah". "kepala laboratorium, teknisi/tenaga laboratorium, dan laboran".
   b. dimensi "pendidik (guru)" yang direfleksikan melalui 3 indikator berikut yaitu: "pemenuhan jumlah guru", kualifikasi guru (kualifikasi pendidikan, sertifikasi sebagai guru", dan "kompetensi guru".
   c. dimensi "tenaga administrasi sekolah" yang direfleksikan melalui 3 indikator berikut yaitu: "kepala tenaga administrasi", pelaksana urusan administrasi", dan "petugas layanan khusus".
   d. dimensi "tenaga perpustakaan" yang direfleksikan melalui 3 indikator berikut yaitu: "kepala perpustakaan", dan "tenaga perpustakaan".
   e. dimensi "tenaga laboratorium" yang direfleksikan melalui 3 indikator berikut yaitu: "kepala laboratorium", teknisi/tenaga laboratorium", dan "laboran".
6. Bahwa untuk meningkatkan ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana satuan pendidikan Sekolah Dasar Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu diprioritaskan pada peningkatan dimensi "kelengkapan sarana dan prasarana" yang direfleksikan melalui 2 indikator berikut yaitu: "ruang pembelajaran umum dan ruang penunjang".

7. Bahwa untuk meningkatkan ketercapaian Standar Pengelolaan satuan pendidikan Sekolah Dasar Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu diprioritaskan pada peningkatan:
   a. dimensi "pelaksanaan rencana kerja" yang direfleksikan melalui indikator "peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah", budaya dan lingkungan sekolah", "bidang sarana dan prasarana", bidang pendidik dan tenaga kependidikan", "bidangan kesiswaan", "pelaksanaan kegiatan sekolah" dan "struktur organisasi sekolah".
   b. dimensi "kepemimpinan sekolah" yang direfleksikan melalui indikator "kemampuan kepala sekolah" dan "keteladanan kepala sekolah".
8. Bahwa untuk meningkatkan ketercapaian Standar Pembiayaan satuan pendidikan Sekolah Dasar Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu diprioritaskan pada peningkatan dimensi "sekolah memberikan layanan subsidi silang" yang direfleksikan melalui indikator "pembebasan biaya bagi siswa tidak mampu", "terdapat daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas", dan "melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu".

C. Rekomendasi

Berdasarkan implikasi manajerial di atas, maka dapat disampaikan rekomendasi bagi peningkatan ketercapaian 8 Standar Nasional Pendidikan sebagai berikut:

1. Bagi Satuan Pendidikan

a. Setiap satuan pendidikan Sekolah Dasar Provinsi Sumatera Selatan perlu:
   - memperkuat materi pembelajaran pada dimensi pengetahuan, baik yang berbasis faktual, konseptual, prosedural, maupun metakognitif.
   - memperkuat pelaksanaan program literasi.

b. Setiap satuan pendidikan Sekolah Dasar Provinsi Sumatera Selatan perlu memperkuat kurikulum pendidikan di sekolah masing-masing dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan KTSP dan disosialisasikan perangkat kurikulum tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan.

c. Setiap satuan pendidikan Sekolah Dasar Provinsi Sumatera Selatan perlu memperkuat sistem pengawasan terhadap seluruh proses pembelajaran dengan meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam hal pengelolaan pengawasan pembelajaran di sekolah.

d. Setiap satuan pendidikan Sekolah Dasar Provinsi Sumatera Selatan perlu memperkuat pemanfaatan penilaian pendidikan baik oleh pendidik maupun satuan pendidikan.

e. Setiap satuan pendidikan Sekolah Dasar Provinsi Sumatera Selatan perlu:
   1. meningkatkan kualifikasi (sertifikasi sebagai guru, dan sertifikasi kepala sekolah) dan kompetensi kepala sekolah
   2. meningkatkan kualifikasi (kualifikasi akademik, dan sertifikasi pendidik), dan kompetensi guru serta mengusulkan pemenuhan/memenuhi guru yang kurang.
   3. meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga administrasi sekolah serta pengangkatan tenaga administrasi untuk memenuhi kekurangan.
   4. memperkuat tugas dan fungsi tenaga perpustakaan sekolah melalui pengangkatan tenaga baru maupun pemberian tugas tambahan kepada guru

kelas untuk menjadi kepala perpustakaan, ataupun tenaga pengelola perpustakaan.

5. memperkuat tugas dan fungsi tenaga laboratorium sekolah melalui pengangkatan tenaga baru maupun pemberian tugas tambahan kepada guru kelas untuk menjadi kepala laboratorium, teknisi/tenaga laboratorium, ataupun tenaga laboran.

f. Setiap satuan pendidikan Sekolah Dasar Provinsi Sumatera Selatan perlu:
   1. memetakan kondisi pemenuhan standar ruang pembelajaran umum dan ruang penunjang.
   2. menyusun prioritas pemenuhan standar ruang pembelajaran umum dan ruang penunjang.

g. Setiap satuan pendidikan Sekolah Dasar Provinsi Sumatera Selatan perlu:
   1. memperkuat pelaksanaan rencana kerja sekolah melalui peningkatan
      - peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah,
      - budaya dan lingkungan sekolah,
      - bidang sarana dan prasarana,
      - bidang pendidik dan tenaga kependidikan,
      - bidangan kesiswaan,
      - pelaksanaan kegiatan sekolah, dan
      - struktur organisasi sekolah.
   2. Memperkuat kepemimpinan sekolah melalui peningkatan kompetensi kepala sekolah (*leadership*, sikap sosial dan kepribadian).

h. Setiap satuan pendidikan Sekolah Dasar Provinsi Sumatera Selatan perlu memperkuat program pemberian subsidi silang guna meningkatkan tanggungjawab sosial sekolah dan keteraksesan masyarakat kurang mampu dengan memetakan terlebih dahulu kondisi ekonomi siswa.

2. Bagi Pemerintah Daerah

a. Pemerintah kabupaten/kota atau provinsi perlu memfasilitasi seluruh satuan pendidikan Sekolah Dasar untuk:
   - memperkuat materi pembelajaran pada dimensi pengetahuan, melalui pelatihan/workshop/KKG/seminar bagi guru kelas dan guru mata pelajaran secara berkesinambungan.
   - memperkuat pelaksanaan program literasi.

b. Pemerintah kabupaten/kota perlu memfasilitasi seluruh satuan pendidikan Sekolah Dasar untuk memperkuat kurikulum pendidikan di masing-masing sekolah, baik melalui pelatihan, bimbingan teknis, maupun pemberdayaan Kelompok Kerja Guru dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah.

c. Pemerintah kabupaten/kota perlu memfasilitasi seluruh satuan pendidikan Sekolah Dasar untuk memperkuat sistem pengawasan seluruh proses pembelajaran di sekolah.

d. Pemerintah kabupaten/kota perlu memanfaatkan hasil penilaian pendidikan sebagai salah satu bahan penyusunan perencanaan pengembangan sekolah.

e. Pemerintah kabupaten/kota perlu memfasilitasi seluruh satuan pendidikan Sekolah Dasar untuk:
   - meningkatkan kualifikasi (sertifikasi sebagai guru, dan setifikasi kepala sekolah) dan kompetensi kepala sekolah

- meningkatkan kualifikasi (kualifikasi akademik, dan sertifikasi pendidik), dan kompetensi guru serta mengusulkan pemenuhan/memenuhi guru yang kurang.
- meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga administrasi sekolah serta pengangkatan tenaga administrasi untuk memenuhi kekurangan.
- memperkuat tugas dan fungsi tenaga perpustakaan sekolah melalui pengangkatan tenaga baru maupun pemberian tugas tambahan kepada guru kelas untuk menjadi kepala perpustakaan, ataupun tenaga pengelola perpustakaan.
- memperkuat tugas dan fungsi tenaga laboratorium sekolah melalui pengangkatan tenaga baru maupun pemberian tugas tambahan kepada guru kelas untuk menjadi kepala laboratorium, teknisi/tenaga laboratorium, ataupun tenaga laboran.

f. Pemerintah kabupaten/kota perlu:
   - memetakan kondisi pemenuhan standar ruang pembelajaran umum dan ruang penunjang seluruh satuan pendidikan Sekolah Dasar.
   - menyusun prioritas pemenuhan standar ruang pembelajaran umum dan ruang penunjang.
   - menyiapkan anggaran untuk perbaikan/pengadaan ruang pembelajaran umum dan ruang penunjang.

g. Pemerintah kabupaten/kota perlu memfasilitasi seluruh satuan pendidikan Sekolah Dasar untuk memperkuat:
   - pelaksanaan rencana kerja sekolah melalui peningkatan
     1. peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah,
     2. budaya dan lingkungan sekolah,
     3. bidang sarana dan prasarana,
     4. bidang pendidik dan tenaga kependidikan,
     5. bidangan kesiswaan,
     6. pelaksanaan kegiatan sekolah, dan
     7. struktur organisasi sekolah
   - kepemimpinan sekolah melalui peningkatan kompetensi kepala sekolah (*leadership*, sikap sosial dan kepribadian).

h. Pemerintah kabupaten/kota perlu memfasilitasi seluruh satuan pendidikan jenjang sekolah dasar untuk memperkuat program pemberian subsidi silang melalui pemberian akses yang seluas-luasnya bagi sekolah untuk memperoleh sumber-sumber pembiayaan, baik yang berasal dari pemerintah, swasta, maupun kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Demikian Peta Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Satuan Pendidikan SD berdasarkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. Semoga peta mutu ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu pendidikan satuan pendidikan SD di Provinsi Sumatera Selatan.